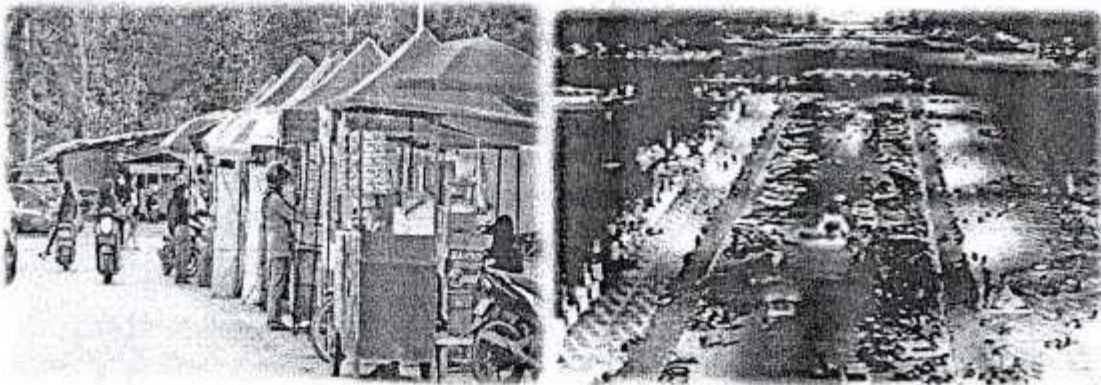




LAPORAN AKHIR

**ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
(KECIL DAN MENENGAH) UNTUK
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN
KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI KABUPATEN KONAWE**



**KERJASAMA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA
DENGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2024**


HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Analisis Pengembangan Usaha Mikro (Kecil Dan Menengah) Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kabupaten Konawe
2. Ketua Tim :
 - a. Nama Lengkap : Dr. Melati, SE., M.Si
 - b. NIDN : 0929048302
 - c. Alamat : Kampus Universitas Lakidende Unaaha Jl. Sultan Hasanuddin No.234 Kel. Lalosabila
3. Jumlah Tim Ahli : 4 (Empat) Orang
4. Jangka Waktu Penyusunan : 4 (Empat) Bulan
5. Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Konawe
6. Biaya Penelitian : Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
7. Sumber Dana : APBD Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024

Mengetahui
Ketua LPPM,

Hasjad, S.Sos., M.H
NIDN. 0911038803

Konawe, 2 Oktober 2024
Ketua Tim Pelaksana
LPPM Universitas Lakidende


Dr. Melati, SE., M.Si
NIDN. 0929048302

Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan
Kabupaten Konawe,

Hj. Riny Andriani, SP. M.Si
NIP. 197911192010012013

KATA PENGANTAR

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh dinamika dan perkembangan perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi penentu perkembangan perekonomian daerah dan nasional. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang tangguh di tengah krisis ekonomi yang terjadi.

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan petunjuk-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akhir ini dengan judul Analisis Pengembangan Usaha Mikro (Kecil Dan Menengah) Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kabupaten Konawe Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Atas kegigihan dan kerjasama semua tim, kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan serta pengangguran di Kabupaten Konawe yang akan terus diupayakan melalui rumusan masalah, metode dan langkah-langkah yang akan menjadi konsep dalam pertumbuhan ekonomi.

Tentu saja kami menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga memerlukan banyak kritik dan masukan dari semua pihak agar menjadi lebih baik. Harapan kami ialah laporan menjadi acuan dalam penelitian yang akan dilakukan kedepan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua. Aamiin.

Unaaha, Oktober 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I .PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Hasil Penelitian	7
E. Sasaran Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Konsep Pengembangan	8
B. Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	11
C. Konsep Pertumbuhan Ekonomi	19
D. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	39
E. Penelitian Terdahulu	40
F. Kerangka Pemikiran Penelitian	44
BAB III. METODE PENELITIAN	45
A. Metode dan Pendekatan Penelitian	45
B. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	45
C. Objek Penelitian	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Metode Analisa Data	47

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	49
B. Keadaan Geografis.....	49
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Deskripsi Hasil Penelitian	53
1. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengetasan Kemiskinan dan Pengangguran di Kabupaten Konawe	53
2. Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Konawe (2016-2023)	67
B. Pembahasan Hasil Penelitian	69
1. Analisis Pengembangan UMKM dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran di Kabupaten Konawe	69
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan UMKM Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kabupaten Konawe	77
BAB VI. PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Rekomendasi	95
REFERENSI	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data UMKM 2018-2023	3
Tabel 5.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Konawe	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah UMKM di Indonesia Berdasarkan Provinsi.....	2
Gambar 2.1. Kerangka Penelitian	44
Gambar 3.1. Data BPS Statistik Kab. Konawe	47
Gambar 4.1. Peta Kab. Konawe	52
Gambar 5.1. Presentase UMKM Laki-Laki & Perempuan	65

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

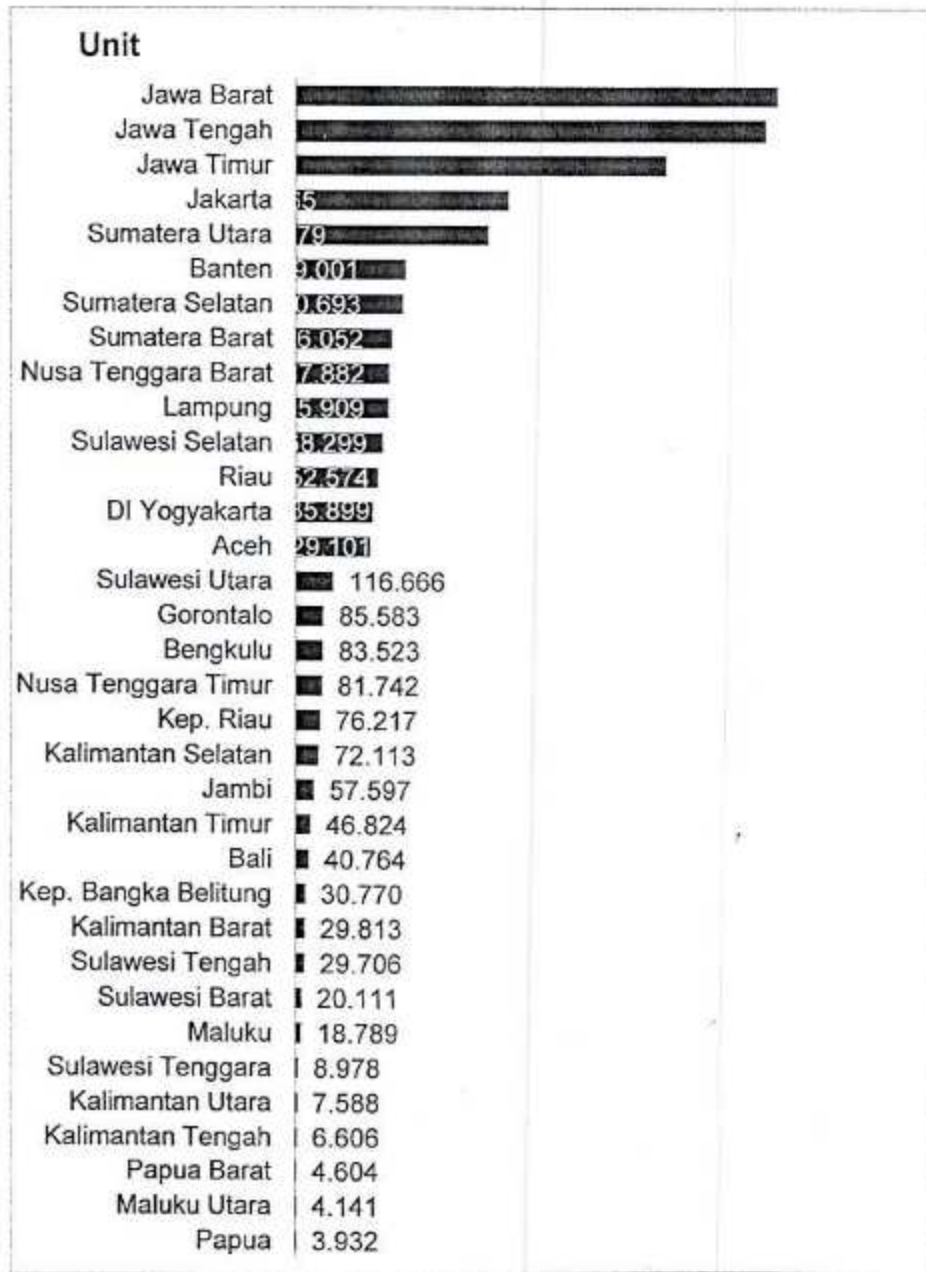
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini merupakan suatu usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang bukan bagian dari anak perusahaan, memiliki peran yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir UMKM mampu memberikan kontribusi pada peningkatan produk domestik bruto. UMKM merupakan kegiatan bisnis yang tidak hanya dimaksudkan untuk tujuan mendapatkan keuntungan maksimum saja, namun juga bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan perusahaan lebih lanjut agar dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Kehadiran UMKM juga berperan penting dalam menyerap tenaga kerja Indonesia. karena UMKM bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat untuk mengurangi pengangguran. (Lestari, Lubis, & Widayanto, 2015).

Pada saat krisis ekonomi berlangsung di Indonesia, Usaha Kecil dan Menengah merupakan sektor ekonomi yang memiliki ketahanan paling baik. Kemampuan Usaha Kecil dan Menengah perlu diberdayakan dan dikembangkan secara terus menerus dengan berusaha mereduksi kendala yang dialami Usaha Kecil dan Menengah, sehingga mampu memberi kontribusi lebih maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Novianti & Zulfikar, 2018). Usaha kecil memegang peranan penting dalam perekonomian di hampir semua negara yang sedang berkembang. Usaha kecil juga banyak memberikan kontribusi terhadap pemerataan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja serta mewujudkan pemerataan hasil pembangunan.

Maka maju mundurnya industri kecil di Indonesia turut mempengaruhi perekonomian Indonesia. (Handayani & Tanjung, 2017). Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tumbuh subur di berbagai sektor. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam (Santika, 2023) jumlah UMKM di Indonesia mencapai hingga 8,71 juta unit usaha pada 2022. Pulau Jawa

merupakan pulau yang mendominasi ruang tersebut sebanyak 1,49 juta unit usaha. Berikut merupakan grafik jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia. Pada tahun 2021 lalu, pemerintah meluncurkan platform Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS RBA) yang bisa diakses melalui www.oss.go.id. Website ini digunakan sebagai media pendaftaran perizinan usaha di Indonesia bagi pelaku usaha. Hingga 2022, jumlah UMKM yang sudah mendaftarkan bisnisnya di platform OSS sudah mencapai 8,71 Juta unit dengan persebaran lokasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Jumlah UMKM di Indonesia Berdasarkan Provinsi:



Data Kadin Indonesia 2023:

Tabel 1.1 Data UMKM 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64.19	65.47	64	65.46	66
Pertumbuhan (%)					

Kategori UMKM pada dasarnya berdasarkan besarnya modal usaha saat pendirian. Bila modal usahanya mencapai maksimal satu milyar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), maka dikategorikan kelas Usaha Mikro. Usaha dengan modal usaha lebih dari satu milyar rupiah sampai dengan lima milyar rupiah masuk dalam kelas Usaha Kecil. Usaha dengan modal usaha lebih dari lima milyar rupiah sampai dengan sepuluh milyar rupiah masuk dalam kelas Usaha Menengah. Lebih besar dari ini, maka menjadi kelas Usaha Besar.

1. Akses Pembiayaan

Menurut data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada 2020 terdapat sekitar 46,6 juta dari total 64 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Hambatan pembiayaan yang dialami UMKM menjadi landasan bagi Pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas pembiayaan lainnya, antara lain melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), Mekaar PNM, Bank Wakaf Mikro, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema pembiayaan ini dapat diakses UMKM sesuai kelasnya seiring dengan berkembangnya tingkat bisnis UMKM. Sejak 19 Januari 2022, skema KUR terdiri dari KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus, dan KUR PMI. Khusus untuk KUR Super Mikro dan KUR Mikro tidak diperlukan agunan tambahan. Perkembangan Kredit UMKM sendiri terus meningkat dan NPL terus terjaga stabil. Kredit UMKM terus meningkat hingga mencapai Rp1.275,03 triliun atau tumbuh 16,75% (yoy). NPL tetap terjaga pada kisaran 4%, di mana posisi terakhir pada April 2022 NPL tercatat mencapai 4,38%, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang berada di 4,41%.

2. Kontribusi ekspor UMKM

Jumlah kontribusi ekspor UMKM naik dari 14,37% pada 2020 menjadi 15,69% pada 2021. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing UKM yakni dengan memanfaatkan peluang integrasinya ke dalam pasar global melalui Global Value Chain (GVC) maupun Global E-Commerce (GEC). Integrasi UKM ke dalam GVC dapat dilakukan dalam bentuk ekspor tidak langsung melalui agregator domestik maupun perusahaan afiliasi asing.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang masih dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 27,5 juta jiwa atau 9,72% dari total penduduk. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang penting. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 7% pada tahun 2024. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah muncul sebagai kekuatan ekonomi yang signifikan dengan potensi besar untuk memainkan peran krusial dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam beberapa dekade terakhir, UMKM di Indonesia telah tumbuh pesat, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. (Badan Pusat Statistik, 2023). Tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor penting dalam kemakmuran masyarakat. Ketika tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud maka saat itulah pendapatan masyarakat mencapai maksimum, namun jika menganggur atau tidak bekerja akan mengurangi pendapatan yang mana tingkat kemakmuran yang dicapai akan berkurang sehingga menyebabkan buruknya kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2004). Semakin besar tenaga kerja yang terserap maka semakin banyak pula masyarakat yang memiliki pendapatan untuk meningkatkan taraf hidupnya dan keluar dari kategori miskin.

Artinya, penyerapan tenaga kerja akan mengurangi jumlah kemiskinan di daerah tersebut.

Berdasarkan peraturan daerah no .7 lembaran daerah Kabupaten Konawe tahun 2020 nomor 243 peraturan daerah (perda) tentang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro: Koperasi dan usaha mikro sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus sebagai wahana menciptakan lapangan kerja. Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Dalam Usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ingin diwujudkan melalui ketahanan serta kemandirian ekonomi maka terhadap koperasi dan usaha mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Kabupaten Konawe perlu diberdayakan sehingga perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkelanjutan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha koperasi dan usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan (.UUD 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 25 Tahun 1992; UU No 20 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 01 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 1995; PP No 44 Tahun 1997; PP No 33 Tahun 1998; PP No 26 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; PP No 1 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2013; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 98 Tahun 2014; Perpres No 62 Tahun 2015; Permenkop UKM No 10/Per/M.KUKM/IX/2015; Permenkop UKM No 15/Per/M.KUKM/IX/2015; Permenkop UKM No 16/Per/M.KUKM/IX/2015; Permenkop UKM No 25/Per/M.KUKM/IX/2015; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda No 6 Tahun 2016. Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Landasan, Asas, Tujuan dan Prinsip; Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan; Pelaksanaan dan Koordinasi Pemberdayaan; Bentuk Kegiatan Pemberdayaan dan Usaha Mikro; Pelaporan; Perlindungan, Iklim Usaha dan Kemitraan; Pembinaan dan Pengawasan.

Seperti pusat perbelanjaan dalam hal ini UMKM yang dapat menyediakan berbagai macam kebutuhan sandang maupun pangan. Keberadaan UMKM dapat membantu pemerintah dari segi pendapatan pajak dan terbukanya lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Sedangkan pada masyarakat di Kota Unaaha Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat dan terbukanya peluang kerja bagi masyarakat umum. Potensi sektor UMKM di Kabupaten Konawe ini menjadi daya tarik yang perlu mendapatkan respon dan perhatian dari berbagai stakeholder terutama pemerintah daerah Kabupaten Konawe, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat secara umum. Masyarakat lokal harus diberikan ruang untuk berperan dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Konawe dalam upaya pengetasan kemiskinan melalui konsep pemberdayaan dengan pengembangan UMKM mandiri.

Dalam konteks ini, penelitian merupakan salah satu upaya pihak eksternal dalam hal ini Perguruan Tinggi untuk berkontribusi dalam upaya pengembangan UMKM di Kabupaten Konawe sehingga langkah ini dapat dijadikan sebagai dukungan terhadap sasaran strategis kebijakan prioritas pemerintah secara nasional maupun secara regional di wilayah Kabupaten Konawe. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis Pengembangan Usaha Mikro (Kecil dan Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengetasan Kemiskinan dan Pengangguran yang memiliki potensi untuk direkomendasikan menjadi prioritas pengembangan UMKM di Kabupaten Konawe.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat sebagai question research dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengembangan UMKM dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Konawe?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan UMKM dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran ke di Kabupaten Konawe?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengembangan UMKM mandiri dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Konawe?
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan pengentasan kemiskinan dan pengangguran ke di Kabupaten Konawe?

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun Manfaat hasil penelitian yang diharapkan dapat dicapai dalam kegiatan penelitian ini berupa pengembangan UMKM sangat potensial untuk dikembangkan di kabupaten Konawe yang merupakan hasil analisis dan direkomendasikan untuk dikembangkan menjadi percontohan UMKM dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

E. Sasaran Penelitian

Sasaran dalam penelitian ini ialah pelaku Home Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Konawe dan menjadi produk kebijakan Litbang yang bersinergi dengan Perguruan Tinggi dalam usaha membangun daerah khususnya Kabupaten Konawe.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pengembangan

Pengembangan dalam kamus bahasa Indonesia adalah suatu perluasan. Pengembangan merupakan perluasan atau pendalaman suatu materi pembelajaran sehingga menghasilkan suatu produk. Pengembangan secara harfiah artinya proses, cara, pembuatan mengembangkan. Sedangkan arti pengembangan secara utuh adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan atau latihan.² Pengembangan juga dapat diartikan sebagai kajian atau rancangan yang dilakukan secara sistematis guna merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi proses serta hasil dari sebuah pengembangan yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan internal. Pengembangan dilakukan untuk menciptakan hasil produk temuan berdasarkan uji lapangan. Pengembangan sendiri adalah sebuah proses penerjemahan spesifikasi desain kedalam bentuk fisik, didalamnya meliputi teknologi cetak, teknologi audio visual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu usaha atau proses yang dilakukan secara sistematis guna menciptakan suatu produk terbaru baik berupa cetak maupun dalam teknologi audio visual dan berbasis komputer yang dapat memberikan kemajuan didalam suatu pekerjaan atau jabatan.

"Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada". Borg and Gall mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai berikut:

Educational Research and development (R & D) is a process used to develop and validate educational products. The steps of this process are usually referred to as the R & D cycle, which consists of studying research findings pertinent to the product to be developed, developing the products based on these findings, field testing it in the setting where it will be used eventually, and revising it to

correct the deficiencies found in the field-testing stage. In more rigorous programs of R&D, this cycle is repeated until the field-test data indicate that the product meets its behaviorally defined objectives.

Penelitian Pendidikan dan pengembangan (R & D) adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus R & D, yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dalam pengaturan di mana ia akan digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap mengajukan pengujian. Dalam program yang lebih ketat dari R & D, siklus ini diulang sampai bidang-data uji menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi tujuan perilaku didefinisikan. Seals dan Richey mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai proses menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fisik atau dengan ungkapan lain, pengembangan berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan atau memperbaharui produk-produk yang valid dan efektif digunakan dalam pendidikan. Dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan, ada beberapa metode yang digunakan, yaitu metode deskriptif, metode evaluatif, dan metode eksperimental.

- a. Metode deskriptif, digunakan dalam penelitian awal untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada.
- b. Metode evaluatif, digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Pengembangan produk tersebut melalui serangkaian uji coba.
- c. Metode eksperimen, digunakan untuk menguji kemampuan dari produk yang dihasilkan.

Selain itu pengembangan adalah proses meningkatkan sesuatu yang telah ada menjadi lebih baik atau menciptakan sesuatu yang baru. Dalam konteks

organisasi, pengembangan SDM (Human Resource Development) melibatkan bantuan karyawan secara berkelanjutan dan terencana untuk:

1. Memperoleh atau mempertajam kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai fungsi terkait dengan peran mereka saat ini atau yang akan datang.
2. Mengembangkan pengetahuan umum sebagai individu dan menemukan serta mengeksplorasi potensi diri untuk tujuan pengembangan organisasi.
3. Mengembangkan budaya organisasi di mana hubungan supervisor-bawahan, kerja tim, dan kolaborasi di antara sub-unit berkontribusi pada kesejahteraan profesional, motivasi, dan kebanggaan karyawan.

Dalam konteks penelitian, pengembangan model penelitian melibatkan tahapan-tahapan sistematis untuk mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Proses ini meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan evaluasi produk agar dapat dipertanggungjawabkan hasil dan manfaatnya. Pengembangan model penelitian juga melibatkan langkah-langkah seperti:

1. Planning: Menyusun rencana penelitian, termasuk kemampuan-kemampuan yang diperlukan dan desain penelitian.
2. Develop: Penentuan desain produk, sarana dan prasarana penelitian, tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan, dan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat.
3. Preliminary Field Testing: Uji produk secara terbatas, seperti melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk.
4. Implementation: Mengembangkan produk dan memvalidasi produk tersebut dalam proses pembelajaran

Dalam pengembangan bahan ajar, tahap-tahap pengembangan melibatkan analisis kebutuhan, seleksi materi, dan validitas ahli serta kepraktisan.

B. Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.¹Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.² Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan berperan penting dalam proses pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20, 2008, ketentuan umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah paada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau

jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah daripersaingan usaha yang tidak sehat.

Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagaiberikut.

- a. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
- c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- d. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
- e. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan.

2. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementrian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin

industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

3. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

- 1) **Livelihood Activities**, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) **Micro Enterprise**, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) **Small Dynamic Enterprise**, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) **Fast Moving Enterprise**, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

4. Peranan UMKM

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

5. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapakan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

6. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga

- kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
 - c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
 - d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil samping dari industri besar atau industri yang lainnya
 - e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

a. Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
- Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih. Dari kedua

faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan; bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan; bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Umum, Asas, Prinsip Dan Tujuan Pemberdayaan, Kriteria, Penumbuhan Iklim Usaha, Pengembangan Usaha, Pembiayaan Dan Penjaminan, Kemitraan, dan Koordinasi Pemberdayaan, Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

C. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Dari sini dapat melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan peningkatan output agregat atau pendapatan riil. Kedua peningkatan tersebut biasanya di hitung perkapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan penggunaan input. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.¹⁷ Dari aspek dinamis melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan pembangunan nasional, maka harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara tepat. Laju pertumbuhan ekonomi daerah biasanya digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pembangunan daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan

ekonomi daerah tersebut dapat ditunjukkan oleh kenaikan GDP atau PDRB. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Proses tersebut mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri- industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik.

Menurut Todaro dan Smith pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus-menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Dimana ada empat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (negara) yaitu:

a. Akumulasi Modal

Akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan pada masa sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk dapat memperbesar output pada masa yang akan datang. Pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan- peralatan, dan barang-barang baru akan meningkatkan stok modal (*capital stock*) fisik suatu negara (yaitu jumlah riil bersih dari semua barang-barang modal produktif secara fisik) sehingga pada gilirannya akan memungkinkan negara tersebut untuk mencapai tingkat output yang lebih besar.

b. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti: semakin banyak jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak pasokan tenaga kerja, dan semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik.

c. Kemajuan Teknologi

Menurut para ekonom, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh adanya cara-cara baru atau mungkin cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional, seperti cara menanam padi, membuat pakaian, atau membangun rumah. Ada tiga macam klasifikasi mengenai kemajuan teknologi yaitu : kemajuan teknologi yang bersifat netral, kemajuan teknologi yang bersifat menghambat tenaga kerja, kemajuan teknologi yang bersifat menghambat modal.

Simon Kuznets dalam kuliahnya pada Peringatan Nobel mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai "kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya" kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini memiliki 3 komponen: *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang; *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Teknologi modern misalnya, tidak cocok dengan corak desa, pola keluarga besar, usaha keluarga, dan buta huruf.

Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, berupa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) atau di tingkat regional disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam

jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

Menurut ekonom klasik, pertumbuhan ekonomi secara klasik dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Kenyataan seperti ini menyisakan pertanyaan, mengapa pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun tidak diikuti oleh penurunan angka pengangguran, atau pengangguran justru meningkat setiap tahunnya. Padahal secara teori pertumbuhan ekonomi menurut pandangan para ekonom Klasik yang antara lain Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Stuart Mill, maupun ekonom Neo-Klasik antara lain Robert Solow dan Trevor Swan, pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (a) jumlah penduduk, (b) jumlah stok barang modal, (c) luas tanah dan kekayaan alam, dan (d) tingkat teknologi yang digunakan.

Salah satu unsur yang penting dan menjadi faktor positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan meningkatkan luasnya pasar domestik. Namun kenyataan yang terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat juga akan memberikan efek negatif terhadap perkembangan ekonomi, sehingga diperlukan sistem perekonomian yang mampu untuk menyerap dan secara produktif mempekerjakan tambahan tenaga tersebut.

Teori pertumbuhan baru memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari hanya sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia.

Laju pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Kebenaran hubungan yang positif tersebut tergantung pada kemampuan sistem ekonomi untuk menyerap dan mempekerjakan tambahan pekerja secara produktif. Teori neoklasik menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang menjelaskan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Teori Solow (Neo Klasik) juga menyatakan bahwa laju pertumbuhan angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang disebabkan melalui semakin banyaknya angkatan kerja yang bekerja, maka kemampuan untuk menghasilkan output semakin tinggi. Dengan banyaknya output yang mampu dihasilkan, maka akan mendorong tingkat penawaran agregat sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Istilah pertumbuhan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lain, negara satu dengan negara lain. Penting bagi kita untuk dapat memiliki definisi yang sama dalam mengartikan pertumbuhan. Secara tradisional pertumbuhan memiliki peningkatan terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto suatu negara²⁷. Untuk daerah, makna pertumbuhan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu provinsi, kabupaten atau kota. Terdapat tiga komponen pokok dalam definisi pertumbuhan ekonomi tersebut tersebut, yaitu:

1. Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi dari pertumbuhan ekonomi sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang merupakan tanda kematangan ekonomi (*economic maturity*) pada negara bersangkutan.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkesinambungan dimana pemerintah berperan dalam investasi bidang pendidikan.
3. Mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam kemajuan teknologi dilakukan penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi.

Sehingga secara sosial dan ekonomi terjadi pertumbuhan yang seiring.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya seperti di bawah ini:

a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia adalah suatu faktor yang penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena SDM merupakan faktor yang penting dalam proses pembangunan, cepat atau lambatnya proses dari pembangunan sangat tergantung pada sumber daya manusianya yang selaku sebagai subjek pembangunan yang mempunyai kompetensi yang baik dan cukup memadai untuk melaksanakan proses dari pembangunan tersebut. Peningkatan GNP per kapita yang begitu hebat rupanya berkaitan erat dengan pengembangan faktor manusia sebagaimana terlihat dalam efisiensi atau produktivitas yang melonjak dikalangan tenaga buruh. Inilah yang oleh para ahli ekonomi modern disebut pembentukan modal insani, yaitu, "Proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh penduduk yang bersangkutan." Proses ini mencakup kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial pada umumnya. Perkiraan Dension mengungkapkan bahwa pengeluaran untuk pendidikan di Amerika Serikat antara 1929-1957 telah menyumbang 23% terhadap output nasional bruto mereka. Menurut Solomon Fabricant, kenaikan seluruh produk nasional Amerika Serikat melalui kenaikan modal fisik antara 1889-1957 itu menyamai jumlah kenaikan yang tercapai melalui peningkatan produktivitas buruh. Jadi, "persyaratan yang paling penting bagi laju pertumbuhan industri ialah manusia. Manusia yang bersedia menyambut baik tantangan perubahan ekonomi dan menerima kesempatan yang ada di dalamnya. Manusia, diatas segalanya, yang berdedikasi terhadap pembangunan ekonomi negerinya, dan terhadap kejujuran, kewibawaan, pengetahuan, dan prestasi kerja.

b. Faktor Sumber Daya Alam (SDA)

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah. "Tanah" sebagai mana dipergunakan dalam

ilmu ekonomi mencakup sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumberlautan dan sebagainya. Dalam dan bagi pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber alam tidak akan membangun dengan cepat. Sebagai mana dinyatakan oleh Lewis, "Dengan hal-hal lain yang sama, orang dapat mempergunakan dengan lebih baik kekayaan alamnya dibandingkan apabila mereka tidak memilikinya.

SDA atau sumber daya alam merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, karena umumnya negara yang sedang dalam tahap perkembangan sangat bergantung pada sumber daya alam dalam pembangunan negaranya. Akan tetapi jika bergantung pada sumber daya alam saja tidak akan menjamin kesuksesan dalam proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, jika tidak di dukung dengan kemampuan SDM (Sumber daya manusia) dalam mengelola SDA (sumber daya alam) yang ada. Sumber daya alam misalnya seperti: kesuburan tanah, kekayaan akan mineral, kekayaan tambang, hasil alam, laut dan lain sebagainya.

Seringkali dikatakan bahwa pembangunan ekonomi dapat terjadi meskipun negara bersangkutan kekurangan sumber alam. Sebagaimana dikemukakan Lewis, "Suatau negara yang dianggap miskin sumber alam saat ini mungkin dapat dianggap sangat kaya dikemudian hari, tidak saja lantaran diketemukannya sumber-sumber yang tersembunyi, tetapi juga karena penggunaan sumber yang telah diketahui dengan cara baru." Jepang adalah negara seperti itu. Jepang yang kekurangan dalam sumber alam tetapi karena ia berhasil menemukan penggunaan baru sumber-sumbernya yang terbatas, maka jadilah ia salah satu negara termajudi dunia. Dengan mengimpor bahan mentah dan bahan tambang tertentu dari negara lain, Jepang berhasil mengatasi kekurangan sumber alamnya melalui teknologi tinggi, penelitian baru, dan ilmu pengetahuan tinggi. Begitu pula Inggris, berkembang kendati tanpa minyak bumi dan logam nonbelerang. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi,

kekayaan alam yang melimpah saja belum cukup. Yang terpenting ialah pemanfaatannya secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga efisiensi dipertinggi dan sumber dapat dipergunakan dalam jangka waktu lebih lama.

c. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Perkembangan ilmu pengetahuan semakin kesini semakin pesat khususnya di bidang teknologi, hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara, misalnya penggantian dalam memproduksi barang yang asalnya menggunakan tenaga manusia sekarang sudah banyak yang menggunakan mesin yang canggih dan modern yang tentunya akan lebih efisien dan lebih cepat dalam menghasilkan produk, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh modal dan faktor produksi yang lain. Kuznets mencatat lima pola penting pertumbuhan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi modern. Kelima pola tersebut ialah: penemuan ilmiah atau penyempurnaan pengetahuan teknik; invensi; inovasi; penyempurnaan, dan penyebarluasan penemuan yang biasanya diikuti dengan penyempurnaan. Seperti Schumpeter, ia menganggap inovasi (pembaharuan) sebagai faktor teknologi yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuznets inovasi terdiri dari dua macam : pertama, penurunan biaya yang tidak menghasilkan perubahan apapun pada kualitas produk; kedua, pembaharuan yang menciptakan produk baru dan menciptakan permintaan baru akan produk tersebut. Yang kedua ini merupakan perubahan yang menciptakan permintaan.

d. Faktor Budaya

Faktor yang penting lainnya yaitu faktor budaya, faktor ini akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki fungsi

sebagai pendorong proses pembangunan misalnya seperti kerja keras, bersikap jujur, sopan, dan lain-lain. Akan tetapi faktor ini bias juga menghambat proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi misalnya seperti sikap egois, anarkis, dan sebagainya.

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan Barat membawa ke arah penalaran (reasoning) dan skeptisisme. Yang menanamkan semangat kembara yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan akhirnya memunculkan kelas pedagang baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Orang dibiasakan menabung dan berinvestasi, menikmati resiko untuk memperoleh laba. Mereka mengembangkan apa yang oleh Lewis disebut, "hasrat untuk berhemat," dalam rangka memaksimalkan output berdasarkan input tertentu. Alhasil, seperti negara-negara Eropa, yang mengalami revolusi industri di abad ke-18 dan 19. Penduduk bermigrasi ke daerah perkotaan. Kebutuhan baru menjamur. Akibatnya, sektor industri meluas lebih jauh. Kebebasan agama dan ekonomi kian mendorong perubahan pandang dan nilai sosial unit keluarga terpisah menggantikan sistem keluarga bersama; ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi modern.

e. Sumber Daya Modal

Dan faktor yang terakhir adalah sumber daya modal, faktor ini sangatlah dibutuhkan manusia dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan meningkatkan kualitas dari Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK). Sumber daya modal ini misalnya berupa barang yang penting untuk perkembangan serta kelancaran dalam pembangunan ekonomi, sebab barang modal ini juga bisa meningkatkan dan memperbaiki produksi. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam ungkapan Profesor Nurkse, "Makna pembentukan modal ialah, masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi

mengarahkan sebagian daripadanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya." Dalam arti ini pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama menuju pembangunan ekonomi.

f. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh dan membantu meningkatkan produktifitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, parawiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko diantara ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Menurut Schumpeter, seorang wiraswastawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya ialah melakukan pembaharuan (inovasi). Revolusi industri di Inggris merupakan jasa para wiraswastawan ini, begitu juga pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada abad ke-19 dan pertengahan abad ke-20 merupakan jasa penyempurnaan kualitas manajemen.³⁵ Jadi disamping perusahaan swasta, pengertian organisasi mencakup pemerintah, bank dan lembaga-lembaga internasional yang ikut terlibat di dalam memajukan ekonomi negara maju dan negara sedang berkembang.

g. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa kearah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Hal ini menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Adam Smith menekankan arti penting pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien daripada sebelumnya. Ia menghemat waktu. Ia mampu menemukan mesin

baru dan berbagai proses baru dalam memproduksi. Akhirnya, produksi meningkatkan berbagai hal. Akan tetapi, pembagian kerja tergantung pada luas pasar. Luas pasar, sebaliknya, tergantung pada kemajuan ekonomi, yaitu seberapa jauh perkembangan permintaan, tingkat produksi pada umumnya, sarana transportasi, dan sebagainya. Jika skala produksi luas, spesialisasi dan pembagian kerja akan meluas pula. Alhasil, jika produksi naik, laju pertumbuhan ekonomi akan melesat. Ekonomi eksternal keuangan semakin banyak tersedia dan manfaat dari investasi-minimal berkembang baik. Yang dimaksud dengan investasi minimal adalah sumber tenaga angkutan, dan sebagainya, yang penggunaannya membawa kearah kemajuan industri. Dengan cara ini produksi meningkat dan pertumbuhan ekonomi kian melaju.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor. Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% (yoy) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih terbatas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan I 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian. LU Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum, serta Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 sebesar 5,11% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy) didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan I 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,91% (yoy) seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024, hari libur nasional, dan cuti bersama. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh tinggi sebesar 24,29% (yoy) didorong oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan momen Ramadan. Konsumsi Pemerintah meningkat dengan tumbuh sebesar 19,90% (yoy) didorong oleh kenaikan belanja barang, terutama terkait pelaksanaan Pemilu 2024, serta belanja pegawai. Investasi tumbuh sebesar 3,79% (yoy) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Sementara itu, ekspor tumbuh melambat sebesar 0,50% (yoy), khususnya ekspor barang sejalan dengan penurunan harga komoditas produk utama ekspor, di tengah permintaan beberapa negara mitra dagang utama yang tetap tumbuh.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi antara lain tercatat pada LU terkait mobilitas terutama Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan

Besar dan Eceran. LU Industri Pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring permintaan domestik dan global yang terjaga. Sementara itu, dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, kecuali Sumatera dan Jawa.

Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,05 persen, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,31 persen. Namun, di tengah badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi, Indonesia masih menunjukkan ketangguhan. Kapal ekonomi Indonesia terus melaju, meski diterpa gelombang ketidakpastian. Artikel ini akan menjelajahi panggung ekonomi di kuartal keempat tahun 2023, menggali ke dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi yang akan mengawali kuartal pertama 2024, meretas rintangan ekonomi global yang menghadang di tahun 2024, dan menanggapi tantangan-tantangan spesifik yang melibatkan Indonesia dalam panggung yang sama.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2023 mencapai 5,04 persen (*year on yearly*), sedikit melebihi proyeksi pemerintah sebesar 5 persen. Penyumbang utama pertumbuhan ini adalah peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen terbesar dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, tumbuh 4,82 persen di 2023. Kenaikan upah minimum dan bantuan sosial pemerintah menjadi faktor pendorong utama peningkatan konsumsi rumah tangga. Di tengah tantangan ekonomi global dan inflasi yang tinggi, peningkatan konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih terjaga.

Sementara itu, investasi tumbuh 4,40 persen, didukung oleh realisasi program pembangunan infrastruktur. Meskipun pertumbuhan investasi melambat dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini tetap menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Stabilitas politik dan ekonomi, serta potensi pasar yang besar, menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Belanja pemerintah turun menjadi 2,95 persen di 2023 yang disebabkan upaya pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran.

Meskipun demikian, belanja pemerintah masih memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui program-program pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial pemerintah yang terus berlanjut.

Ekspor dan impor juga mengalami peningkatan. Kenaikan ekspor didorong oleh permintaan global yang relatif masih kuat terhadap komoditas andalan Indonesia, seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan karet. Sementara itu, peningkatan impor didorong oleh kebutuhan bahan baku dan barang modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu bersaing di pasar global.

Secara kumulatif sepanjang 2023, realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan 5,31 persen pada 2022. Hal ini sejalan dengan perkiraan akibat perlambatan ekonomi global dan aktivitas domestik yang terdampak inflasi tinggi.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi di kuartal IV atau Q4 2023 antara lain dapat dilihat dari sisi neraca permintaan agregat: 1) Melambatnya konsumsi rumah tangga menjadi 4,5 persen (yoy) pada Q4 2023 dibanding Q3 2023 sebesar 5,1 persen (yoy), terutama disebabkan melemahnya (tertundanya) daya beli kelas menengah ke atas, serta relatif terbatasnya kenaikan konsumsi segmen berpenghasilan rendah di tengah kenaikan belanja sosial dan politik menjelang pemilihan umum (pemilu); 2) Perlambatan investasi menjadi 5,0 persen (yoy) pada Q4 2023, dibandingkan 5,8 persen pada Q3 2023. Investasi mesin dan peralatan serta kendaraan bermotor mengalami perlambatan seiring melemahnya ekspor dan investasi asing langsung (*foreign direct investment/*FDI), sementara investasi bangunan dan infrastruktur relatif bertahan didukung belanja modal pemerintah; dan 3) Melambatnya kinerja ekspor-impor. Kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan PDB menurun menjadi 0,4 *percentage point* (ppt) pada Q4 2023 dari 0,5 ppt pada Q3 2023. Hal ini mencerminkan peningkatan impor lebih tinggi ketimbang ekspor seiring perlambatan ekonomi global dan harga komoditas yang melemah.

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, beberapa sektor ekonomi utama mencatat perlambatan pertumbuhan pada 2023, di antaranya: 1) Sektor

makanan dan minuman (*food and beverage/F&B*). Penurunan konsumsi rumah tangga pada Q4 dipimpin oleh pengeluaran untuk F&B, kesehatan, dan pendidikan. Pertumbuhan sektor F&B melambat menjadi 7,9 persen (yoy) di Q4 2023 dari 10,9 persen (yoy) di Q3 2023; dan 2) Sektor industri pengolahan tumbuh melambat menjadi 4,1 persen (yoy) di Q4 2023 dari 5,2 persen (yoy) di Q3 2023 yang disebabkan melemahnya permintaan global untuk produk ekspor industri. Di sisi lain, sektor konstruksi menjadi penyokong utama pertumbuhan dengan pertumbuhan 7,7 persen (yoy) di Q4 2023, diikuti sektor pertambangan 7,5 persen (yoy), serta listrik dan gas 8,7 persen (yoy). Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi pertumbuhan masing-masing sebesar 0,47 persen, 0,45 persen, dan 0,05 persen di sepanjang 2023.

Secara kumulatif sepanjang 2023, dari sisi sektoral, sektor transportasi dan penyimpanan mencatat pertumbuhan tertinggi 13,96 persen, didukung kenaikan volume penumpang pesawat domestik dan internasional serta perkembangan moda transportasi kereta api seperti Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dua sektor lain yang tumbuh paling tinggi adalah sektor akomodasi dan restoran yang tumbuh 10,01 persen dan jasa lainnya yang tumbuh 10,52 persen.

Cerita utama dari pertumbuhan ekonomi tahun 2023 adalah kesenjangan antara PDB riil dan nominal. Pertumbuhan PDB riil Indonesia tercatat sebesar 5,05 persen (yoy), didukung oleh pertumbuhan 5,04 persen pada Q4 2023. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi secara nominal jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 6,66 persen (yoy) secara keseluruhan tahun 2023 dan hanya 3,67 persen pada Q4 2023. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pertumbuhan PDB riil dan nominal di 2023 dan mengindikasikan terjadinya fenomena deflasi/disinflasi dalam perekonomian Indonesia. Deflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami penurunan dari waktu ke waktu.

Deflasi atau disinflasi global telah berlangsung sejak Q2 2023. Situasi ini terutama disebabkan oleh dua faktor eksternal: 1) Penurunan harga komoditas. Harga berbagai komoditas global mengalami penurunan tajam. Misalnya harga

litium yang anjlok meski Tiongkok melakukan investasi dan produksi baterai dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan tingkat kelebihan pasokan yang sangat besar. Indonesia memang bukan produsen litium, tetapi gambaran suram ini berlaku juga untuk komoditas ekspor Indonesia seperti batu bara dan nikel ke Tiongkok; 2) Kelebihan kapasitas industri Tiongkok. Sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, Tiongkok saat ini tengah dilanda kelebihan kapasitas produksi di sektor industri, dan situasi ini telah memicu deflasi harga barang-barang industri dan tekanan berat pada mitra dagangnya, termasuk Indonesia.

Dampak deflasi telah dirasakan secara luas. Deflator PDB sebagian besar sektor ekonomi Indonesia hanya 1-2 persen di 2023, jauh di bawah angka inflasi. Satu-satunya yang mengalami inflasi adalah sektor pertanian akibat El Nino. Seluruh sektor bisnis Indonesia diperkirakan akan terus melaporkan penurunan pendapatan dan keuntungan bersih di Q4 2023.

Disinflasi global berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dampaknya dapat signifikan meskipun Indonesia memiliki beban utang publik dan swasta yang jauh lebih ringan dibanding negara maju. Disinflasi bisa memicu efek "*money illusion*" terbalik di mana berkurangnya pendapatan ekspor komoditas membuat pelaku ekonomi enggan meningkatkan konsumsi dan investasi yang berpotensi menjadikan kelesuan ekonomi sebagai ramalan yang menjadi kenyataan.

Kesenjangan (gap) antara pertumbuhan PDB riil dan nominal Indonesia pada tahun 2023 dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Pertama, produsen menghadapi penurunan margin keuntungan karena harga jual produk turun secara riil, sementara biaya input relatif tetap. Hal ini dapat menghambat ekspansi usaha dan investasi karena tingkat pengembalian investasi (*return on investment*) yang lebih rendah. Kedua, perlambatan laju pertumbuhan ekonomi riil akibat lesunya permintaan domestik maupun daya saing ekspor juga dapat terjadi. Bahkan, kesenjangan yang berkepanjangan berpotensi memicu fenomena stagnasi semu (*secular stagnation*), di mana pertumbuhan ekonomi melambat dalam jangka panjang. Ketiga, pemerintah juga

akan kesulitan untuk memenuhi target penerimaan pajak dan menggenjot belanja negara. Oleh karena itu, kesenjangan antara pertumbuhan PDB riil dan nominal perlu diatasi agar roda perekonomian tetap berputar dengan baik.

Pemerintah telah memiliki beberapa opsi kebijakan konkret untuk menanggulangi fenomena disinflasi dan dampaknya terhadap perekonomian. Pertama, dapat dilakukan ekspansi fiskal melalui peningkatan belanja negara, stimulus pajak, dan transfer tunai langsung ke masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mendorong permintaan agregat dan mengerek tingkat inflasi. Kedua, Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga acuan serta menerapkan kebijakan makroprudensial yang lebih longgar untuk meningkatkan likuiditas di sistem perbankan. Likuiditas yang cukup dapat merangsang ekspansi kredit dan pengeluaran, memberikan dorongan terhadap tingkat inflasi. Pemberian insentif pajak dan kemudahan investasi dapat mendorong ekspansi sektor industri dalam negeri, meningkatkan kapasitas produksi, dan menyebabkan inflasi dari sisi biaya (*cost push inflation*). Selain itu, untuk mendukung inflasi dari sisi permintaan, pemerintah dapat mendorong peningkatan upah minimum provinsi secara terukur. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, mendukung kenaikan konsumsi, dan mendorong inflasi melalui *demand pull inflation*.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1 2024 tetap optimistis. Lembaga riset Danareksa Sekuritas memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,16 persen (yoy) pada Q1 2024, meningkat dari pertumbuhan 5,04 persen (yoy) pada Q4 2023 dengan didorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,02 persen (yoy) pada Q1 2024, lebih tinggi dari pertumbuhan 4,47 persen (yoy) pada Q4 2023 karena didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat akibat kenaikan upah minimum dan bantuan sosial dari pemerintah.

Belanja pemerintah juga diperkirakan akan meningkat pada Q1 2024, seiring dengan persiapan pemilihan umum (pemilu) yang akan digelar pada Februari 2024. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Investasi diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,10 persen (yoy) pada Q1 2024,

lebih rendah dari pertumbuhan 5,02 persen (yoy) pada Q4 2023 yang disebabkan oleh faktor ketidakpastian menjelang pemilu. Ekspor diperkirakan akan tumbuh terbatas sebesar 1,70 persen (yoy) pada Q1 2024, lebih tinggi dari pertumbuhan 1,64 persen (yoy) pada Q4 2023 yang disebabkan oleh permintaan yang diperkirakan masih positif dari Tiongkok dan negara-negara berkembang lainnya. Impor diperkirakan akan semakin berkontraksi sebesar minus 0,92 persen (yoy) pada Q1 2024, dibandingkan pertumbuhan minus 0,15 persen (yoy) pada Q4 2023 yang disebabkan pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Tahun 2024 akan diwarnai oleh tantangan global yang signifikan. Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 2,9 persen, dipicu oleh perang di Ukraina, inflasi tinggi, dan kenaikan suku bunga. IMF memperkirakan inflasi global akan mencapai 6,5 persen pada tahun 2023, turun dari 8,8 persen pada tahun 2022. Namun, inflasi masih diperkirakan akan tetap tinggi pada tahun 2024, sebesar 4,1 persen. Selain itu, IMF memperkirakan suku bunga kebijakan global akan mencapai 5,2 persen pada tahun 2024, naik dari 3,5 persen pada tahun 2022. Di sisi lain, menurut laporan Prospek Ekonomi Global (GEP) yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada Januari 2024, ekonomi global diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan dari 2,6 persen pada tahun 2023 menjadi 2,4 persen pada tahun 2024 yang merupakan perlambatan ketiga kalinya secara berturut-turut.

Pada tahun 2024, pertumbuhan Amerika Serikat (AS) diperkirakan melambat menjadi 1,6 persen (yoy). Pertumbuhan konsumsi diperkirakan melemah pada tahun 2024 karena nilai tabungan masyarakat akan mulai berkurang seiring dengan pelonggaran pasar tenaga kerja, di tengah efek pengetatan moneter yang terus berlanjut sejak awal tahun 2022. Kebijakan fiskal diperkirakan lebih restriktif, sehingga mengurangi dukungan terhadap konsumsi. Untuk Zona Eropa, diperkirakan akan sedikit meningkat menjadi 0,7 persen (yoy) di 2024 karena tekanan inflasi yang mereda akan meningkatkan upah riil (pendapatan) yang dapat dibelanjakan. Namun, konsumsi kemungkinan masih tertahan karena efek pengetatan moneter yang tertinggal. Secara keseluruhan,

negara-negara maju diperkirakan tumbuh sebesar 1,5 persen yoy di 2023, dan pada 2024 diperkirakan sedikit melambat menjadi 1,2 persen (yoy).

Dari Asia, pada tahun 2024, perekonomian Tiongkok diperkirakan melambat menjadi 4,5 persen (yoy) (direvisi turun sebesar 0,1 ppt dari perkiraan sebelumnya). Investasi masih tertahan di tengah tekanan yang terus-menerus di sektor properti, sementara sentimen yang melemah dapat membebani konsumsi. Hal ini dapat berdampak pada perdagangan global yang tetap lemah pada tahun 2024, dan membebani ekspor serta pertumbuhan permintaan domestik yang lebih lambat menahan impor.

Selain tantangan global, Indonesia menghadapi tantangan domestik khusus pada tahun 2024, di antaranya: 1) Pemilu presiden dan legislatif yang akan digelar pada tahun 2024 dapat menimbulkan ketidakpastian politik dan ekonomi yang selanjutnya dapat memengaruhi keputusan investasi dan belanja konsumen; 2) Kenaikan harga pangan dan energi global dapat menyebabkan inflasi di Indonesia meningkat dan menurunkan daya beli masyarakat serta memperlambat pertumbuhan ekonomi; 3) Defisit anggaran pemerintah diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024 yang disebabkan meningkatnya belanja pemerintah untuk persiapan pemilu dan pembangunan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan beban utang negara; 4) Rupiah diperkirakan berpotensi melemah terhadap dolar AS pada tahun 2024 sehingga dapat menyebabkan harga barang-barang impor menjadi lebih mahal dan meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan.

Untuk menghadapi tantangan ekonomi tersebut, pemerintah telah dan akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan seperti: 1) Menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah dan menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil; 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan mendorong ekspor; 3) Melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak perlambatan ekonomi global dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi; dan 4) Melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, yang meliputi penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan

tenaga kerja. Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5,0 persen pada tahun 2024, sementara proyeksi World Bank sedikit lebih rendah sebesar 4,9 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan belanja pemerintah. Konsumsi privat diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,10 persen pada tahun 2024, didukung oleh peningkatan pendapatan rumah tangga dan kredit konsumsi (Danareksa Sekuritas). Peningkatan pendapatan rumah tangga didorong oleh kenaikan upah minimum dan bantuan sosial dari pemerintah sedangkan peningkatan kredit konsumsi didorong oleh suku bunga yang rendah dan kemudahan akses kredit. Belanja pemerintah diperkirakan akan meningkat sebesar 6,62 persen pada tahun 2024, didorong oleh persiapan pemilihan umum dan peningkatan belanja infrastruktur. Peningkatan belanja pemerintah akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Inflasi merupakan tantangan lain bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Inflasi diperkirakan akan mencapai 3,19 persen pada tahun 2024 (Mandiri OCE), lebih tinggi dari target Bank Indonesia sebesar 3 persen. Inflasi yang tinggi akan mengurangi daya beli masyarakat dan menurunkan konsumsi domestik. Sementara itu, kenaikan suku bunga juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Bank Indonesia diperkirakan akan menaikkan suku bunga kebijakannya pada tahun 2024 untuk mengatasi inflasi yang selanjutnya dapat berimplikasi pada kenaikan biaya pinjaman dan penurunan investasi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mengalami sedikit perlambatan menjadi 5,05 persen, tetapi tetap menunjukkan ketahanan yang signifikan dalam konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti inflasi yang tinggi dan perlambatan ekonomi global, kestabilan politik dan ekonomi, didukung oleh kebijakan pemerintah yang proaktif, berkontribusi pada ketahanan yang terjaga dalam menghadapi terpaan eksternal dan internal.

Proses perkembangan ekonomi Indonesia juga terus berlanjut, mencerminkan keseimbangan dalam ketidakpastian yang inheren dalam konteks

panggung ekonomi global. Sementara tantangan global seperti perang di Ukraina dan kenaikan suku bunga tetap di depan, langkah-langkah kebijakan yang bijak dan kehati-hatian di tingkat domestik akan dapat memitigasi dampaknya. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,0 persen pada tahun 2024, Indonesia perlu menjaga momentum positif melalui stabilitas, pertumbuhan berkelanjutan, perlindungan terhadap masyarakat rentan, dan percepatan reformasi struktural. Meskipun tantangan tetap ada, perekonomian Indonesia siap menghadapi dinamika global dengan langkah-langkah yang tepat dan terukur. Dengan strategi yang tepat guna serta kebijakan tangguh dan lincah, perekonomian Indonesia diharapkan mampu mengarungi badai tantangan global dan domestik di 2024, serta menjaga laju pertumbuhan ekonomi tetap kokoh berakar pada stabilitas, kualitas, dan keberlanjutan.

D. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang penting. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 7% pada tahun 2024. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah muncul sebagai kekuatan ekonomi yang signifikan dengan potensi besar untuk memainkan peran krusial dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam beberapa dekade terakhir, UMKM di Indonesia telah tumbuh pesat, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. (Badan Pusat Statistik, 2023). Dalam meningkatkan sektor ekonomi di tengah keterpurukan ekonomi global maka UMKM menjadi solusi dalam hal ini (Ahmad, Guntur Eko Saputro, 2022). Berdasarkan data yang didapatkan dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bahwa usaha UMKM telah mencapai 62.9 juta unit yang mana 89% UMKM yang ada di Indonesia bergerak di sektor mikro hal ini kemudian berdampak cukup besar dalam jumlah mengurangi pengangguran karena adanya serapan tenaga kerja (Bagus et al., 2023). UMKM di Indonesia harus lebih ditingkatkan hal ini dapat dilakukan secara

terstruktur, terencana serta yang paling penting adalah secara berkelanjutan (Srijani, 2020). Dalam perkembangan produk UMKM diperlukan marketing penjualan yang baik sehingga produk UMKM dapat laku di pasaran (Sasongko et al., 2021). UMKM di Indonesia merupakan salah satu sektor usaha yang kemudia dapat bertahan di tahun 1998 pada saat terjadinya krisis moneter hal ini berbanding terbalik dengan usaha besar yang kebanyakan dar mereka gulung tikar (Sri et al., 2019). Pada era VUCA memaksakan semua sektor bisnis kearah ketidak pastian namun era ini membuat para pelaku bisnis terutama UMKM untuk dapat terus berjuang (Okta Karneli et al., 2022). VUCA merupakan singkatan dari volatile, uncertain, complex and ambiguous (VUCA) dimana pada kondisi ini seluruh bisnis menghadapi ketidakpastian (Joshi et al., 2020).

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang arah pengembangan Pengembangan UMKM telah dilakukan oleh banyak peneliti dan sangat relevan dengan penelitian ini sebagaimana yang pernah di teliti oleh :

1. **Wahid Wachyu Adi Winarto (2019)**. Melakukan penelitian dengan judul "Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)". Adapun tujuan pada penelitan ini adalah untuk mengetahui peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM dan untuk mengetahui peran fintech dalam meningkatkan literasi keuangan UMKM. Tempat penelitian ini di daerah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemasang. Waktu penelitian adalah pada tanggal 01 November sampai dengan 30 November 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dalam bentuk survei kuesioner. Adapun populasi pada penelitian ini adalah UMKM di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemasang dengan sampel sejumlah 150 responden. Hasil pada penelitian ini adalah adanya peranan fintech dalam inklusi keuangan di UMKM Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemasang. Hal ini dapat dilihat bahwa para pemilik UMKM sudah banyak yang menggunakan aplikasi dan berkerjasama dengan perbankan dan Koperasi Simpan Pinjam sehingga dapat memberikan

kemudahan mengakses berbagai jenis layanan keuangan bank dan koperasi simpan pinjam. Sekarang lembaga keuangan mampu menjangkau seluruh UMKM hingga daerah hingga yang terpencil dan fintech sudah membuka akses pembiayaan usaha yang lebih mudah dan cepat dari lembaga perbankan dan koperasi simpan pinjam. Terakhir, peranan fintech dalam inklusi keuangan di UMKM adalah fintech berkontribusi besar bagi pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal. Adanya peranan fintech dalam literasi keuangan di UMKM kabupaten Pekalongan, kabupaten Batang dan kabupaten Pemasang. Dapat dilihat dari rata-rata peningkatan penggunaan produk dan layanan perbankan, koperasi simpan pinjam, dan lembaga keuangan lain sebesar 6,40% dari sebelum adanya perkembangan fintech.

2. **Irma Muzdalifa, Inayah AuliaRahma, Bella Gita Novalia(2018)**, Melakukan penelitian dengan judul "Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)". Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kendala implementasi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana resiko implementasi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia. Jenis Penelitian pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan oleh penelitian ini adalah dari data sekunder dan data primer. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dilakukan melalui tiga prosedur, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil pada penelitian ini adalah kehadiran sejumlah perusahaan fintech turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran fintech juga sudah merambah keberbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Kendala implementasi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia adalah

infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), perundangundangan, dan kurangnya literasi keuangan.

3. **Duhita Paramaramya Putri Nurdana (2018)**, Melakukan penelitian dengan judul "Analisis Dampak Pinjaman Peer-ToPeer (P2P) Lending terhadap Perkembangan Bisnis UMKM". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pinjaman peer-to-peer lending terhadap perubahan jumlah tenaga kerja, omzet usaha, penjualan produk, keuntungan, dan biaya usaha antara sebelum diberikan pinjaman dengan sesudah diberikan pinjaman peer-to-peer Lending dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan omzet UMKM setelah diberikan pinjaman peer-to-peer lending. Adapun simpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah pinjaman yang diberikan oleh peer-to-peer lending kepada UMKM memberikan dampak yang positif terhadap jumlah tenaga kerja, omzet usaha, jumlah penjualan produk, keuntungan, dan biaya usaha. Hal ini dibuktikan dengan terdapat perbedaan kenaikan yang signifikan dari masing-masing variabel antara sebelum mendapatkan pinjaman dengan setelah mendapatkan pinjaman peer-to-peerlending dan pinjaman yang diberikan oleh peer-to-peer lending berpengaruh positif terhadap perkembangan bisnis UMKM. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan omzet usaha rata-rata per bulan sebesar 41.7 juta rupiah atau 55.8%. Faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan omzet usaha adalah jumlah pinjaman, tenaga kerjadan biaya usaha.
4. **Fatkhul Mufid Cholili (2014)**, melakukan penelitian tentang "Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)". Dalam penelitian variabel independen yang digunakan adalah indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan pengangguran. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah jumlah penduduk miskin. Model Ordinary Least Square (OLS) digunakan pada penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh secara simultan dari ketiga variabel

independen dengan koefisien determinan 0.743 (R-Square). Namun ketika diuji secara parsial PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan IPM dan pengangguran secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

5. **Arisandi, Harjono, & Marheni (2017)**, adalah analisis pengaruh pendidikan, pengangguran, dan jumlah tanggungan keluarga terhadap kemiskinan di kota Pangkal Pinang. Data yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumentasi yang diperoleh langsung melalui pengumpulan informasi pendalaman yang dilakukan di kota Pangkal Pinang. Periode penelitian tahun 2010 hingga 2015. analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pengangguran, dan jumlah tanggungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Pangkal Pinang.

F. Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan pra pengumpulan data meliputi kegiatan persiapan. Dalam tahapan persiapan ini peneliti melakukan kegiatan persiapan kelengkapan administrasi, perizinan, persiapan alat dan bahan penelitian, melakukan koordinasi dengan lembaga terkait khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Konawe serta rekrutmen tim tenaga ahli.

Dalam kegiatan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif (Bungin, 2010). Dalam penelitian pendekatan kualitatif ini, peneliti akan melakukan analisis kualitatif deskriptif. Dalam analisis kualitatif deskriptif, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan potensi wilayah (desa) yang menjadi objek pengembangan UMKM di Kabupaten Konawe dilihat dari aspek kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasana pendukung.

B. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan penyusunan Analisis ini direncanakan waktu pelaksanaannya selama 3 (tiga) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender, yakni sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Pihak Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lakidende.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah di Kabupaten Konawe. Mengingat jumlahnya maka teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih *representative* (Sugiyono, 2011). *Purposive sampling* lebih tepat digunakan oleh para peneliti apabila sebuah penelitian memerlukan kriteria khusus agar

sampel yang diambil nantinya sesuai dengan tujuan penelitian dapat memecahkan permasalahan penelitian serta dapat memberikan nilai yang lebih *representatif*.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik:

a. Dokumentasi

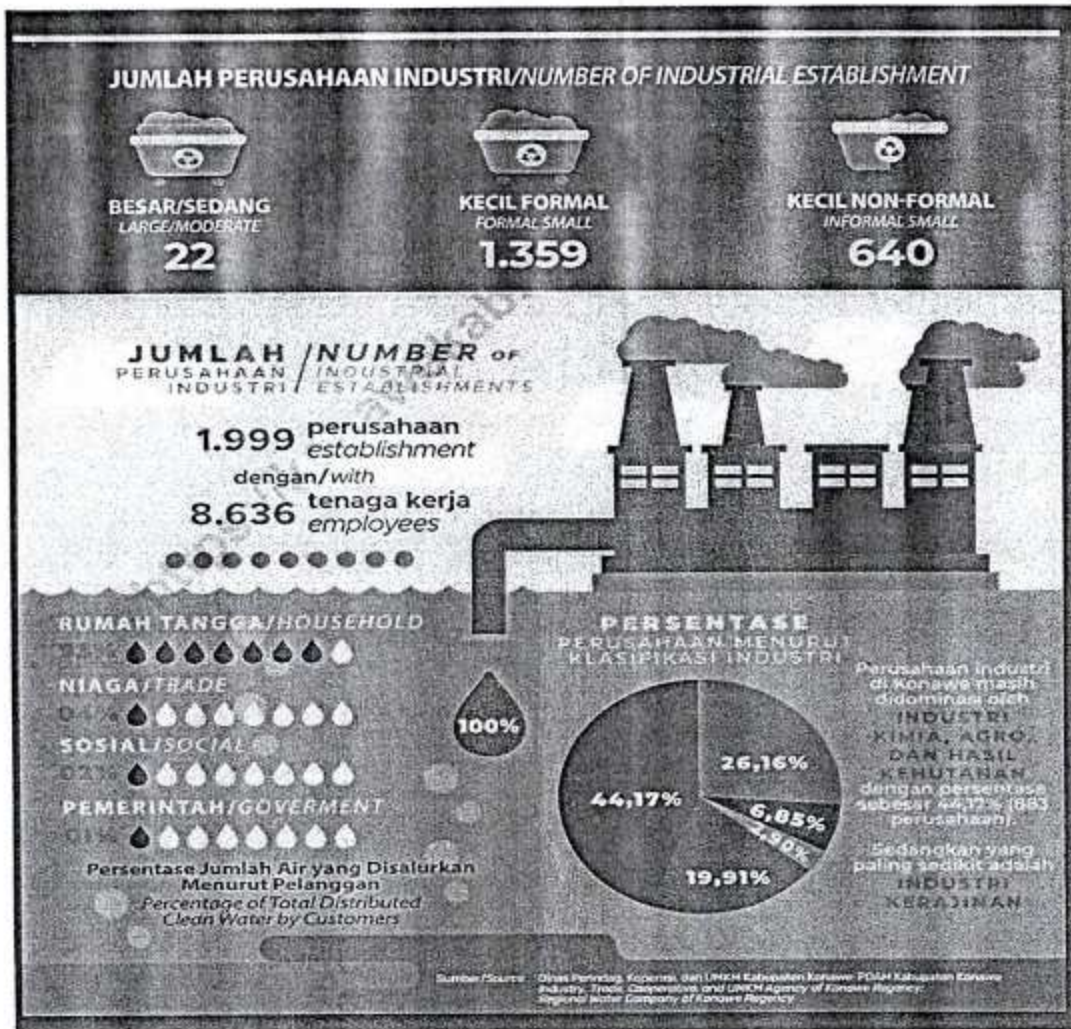
Teknik ini dilakukan dengan jalan menghimpun dokumen-dokumen (data sekunder) kebutuhan penelitian seperti peraturan pemerintah tentang standar operasional prosedur pengembangan UMKM dan data demografi penduduk terkait.

b. Wawancara mendalam

Teknik ini dilakukan dengan cara mempersiapkan pedoman wawancara terstruktur untuk mengcover data potensi daerah termasuk sarana dan prasarana untuk pengembangan UMKM. Responden dalam hal ini adalah segenap stakeholder yang terkait dengan pengembangan UMKM di Kabupaten Konawe yaitu Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Konawe, Kepala Desa terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dan masyarakat setempat terutama para pelaku usaha.

c. Observasi

Observasi ini terutama dilakukan untuk melihat secara langsung bukti fisik berupa potensi daerah sebagai dasar pengembangan desa wisata. Dengan teknik ini, dimungkinkan untuk memperoleh data lapangan untuk ditindaklanjuti sebagai pengembangan wirausaha mandiri. Untuk menjamin validitas data yang diperoleh, khususnya data primer dari para responden, dilakukan metode *triangulasi* sumber. Data dari informan tertentu kemudian dilakukan triangulasi dengan responden lainnya sampai pada tingkat titik jenuh, dimana informasi yang diperoleh benar-benar seragam. Metode triangulasi ini menjadi metode satu-satunya yang diandalkan dalam penelitian ini untuk menjamin validitas data yang diperoleh.



Gambar 3.1. Data BPS Statistik Kab. Konawe

2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah dengan teknik tabulasi data. Teknik ini dilakukan dengan jalan mendeskripsikan potensi yang dimiliki oleh desa dalam bentuk tabulasi data berdasarkan indikator dan sub-sub indikator standar kelayakan menjadi pengembangan wirausaha mandiri. Dengan teknik ini akan diperoleh deskripsi desa yang memenuhi kriteria pengembangan wirausaha mandiri di Kabupaten Konawe.

E. Metode Analisa Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan

cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam menganalisis data yang penulis kumpulkan maka digunakan metode analisis data yang tertitik tolak dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Yang mana bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada ahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan pertama perlu diverifikasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Secara Geografis Kabupaten Konawe berada di bagian selatan garis khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara $2^{\circ}.45'$ dan $4^{\circ}15'$ lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara $121^{\circ}15'$ dan $123^{\circ}30'$ bujur Timur. Posisi Geostrategis, Kabupaten Konawe terletak pada posisi sangat strategi karena: (1). Kabupaten Konawe merupakan imperium berkembangnya kebudayaan tolaki; (2). Kabupaten Konawe berada tepat ditengah wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Posisi ini menempatkan wilayah Kabupaten Konawe sebagai penghubung antar wilayah daratan di Sulawesi Tenggara. Batas-batas wilayah Kabupaten Konawe sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Konawe Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda, Laut Maluku dan kota kendari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur;

B. Keadaan Geografis

1. Luas Wilayah

Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe adalah sekitar 6357,23Ha. Luas wilayah perairan laut 1.960 Km², dengan panjang garis pantai sekitar 295 KM. Secara administratif Kabupaten Konawe terdiri dari 29 wilayah kecamatan, 291 Desa dan 57 Kelurahan.

2. Topografi

Topografi daratan Kabupaten Konawe pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Selain itu terdapat pula pulau-pulau kecil yakni Pulau Bokori, Pulau Saponda Laut dan Pulau Saponda Darat. Dengan kondisi geografis Kabupaten Konawe yang heterogen dan masing-masing wilayah yang memiliki karakteristik berbeda memungkinkan berkembangnya sektor pertanian dalam arti

luas. Diwilayah daratan subsektor pertanian tanaman pangan, subsektor peternakan dan subsektor perkebunan dapat menjadi sektor andalan bagi perekonomian masyarakat, sedangkan diwilayah laut dan garis pantai dimanfaatkan untuk pengembangan subsektor perikanan dan pengembangan pariwisata.

3. Hidrologi

Kabupaten Konawe mempunyai beberapa sungai besar yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian, irigasi dan pembangkit tenaga listrik seperti Sungai Konaweaha dan Sungai Lahumbuti. Kedua sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Konawe sebagai sumber irigasi sawah dimana untuk Sungai Konaweaha yang memiliki debit air cukup besar yakni $\pm 200 \text{ M}^3/\text{detik}$ telah dibangun Bendung Wawotobi yang mampu mengairi sawah seluas ± 18.000 Hektar dan Sungai Lahumbuti telah dibangun Bendung Walay. Selain itu terdapat pula Rawa Aopa yang potensial untuk pengembangan usaha perikanan.

4. Oceanografi

Kabupaten Konawe memiliki perairan $\pm 1.960 \text{ Km}^2$ dan 10 pulau kecil dengan potensi yang cukup besar untuk hasil perikanan laut dan budidaya rumput laut. Disamping itu panorama laut dan pantai yang cukup memikat hati dapat pula dikembangkan sebagai objek pariwisata. Beberapa jenis ikan dari perairan laut Kabupaten Konawe diantaranya seperti Cakalang, Tongkol, Ikan Teri, Ikan Layang, Udang dan lain-lain. Sedangkan untuk hasil laut lainnya seperti Teripang, Jamping-Jamping, Lola, Mutiara dan Agar-agar/Rumput laut.

3. Klimatologi

Di Kabupaten Konawe dikenal dua musim yaitu musim penghujan (bulan November sampai dengan Maret) dan sekitar bulan April terjadi Pancaroba, Agustus sampai Oktober terjadi musim kemarau. Namun melihat fenomena yang ada bahwa sebagai akibat kondisi alam yang sering tidak menentu maka keadaan musim juga sering menyimpang dari kebiasaan. Pola Curah hujan tahunan di Kabupaten Konawe :

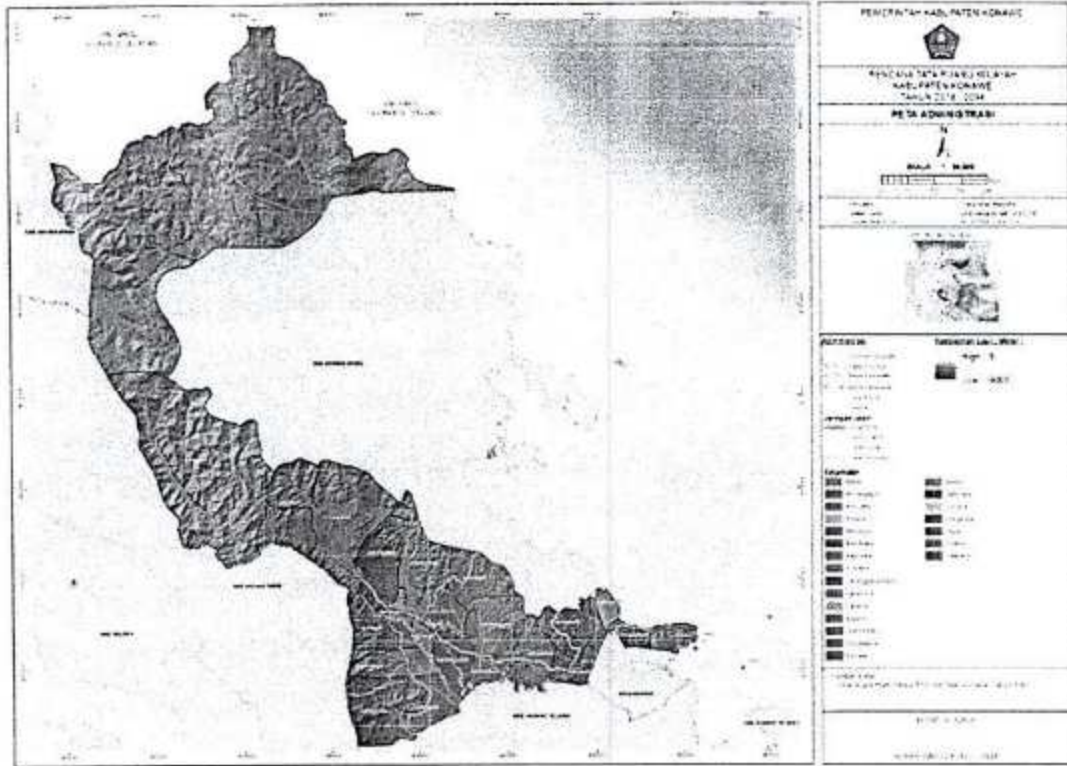
4. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Konawe diperuntukan untuk lahan sawah, lahan bangunan dan halaman sekitarnya, tegal/kebun,ladang/huma, padang rumput, rawan yang tidak ditanami, tambak/kolam/tebat/empang, lahan yang sementara tidak diusahakan, lahan untuk tanaman kayu-kayuan rakyat, hutan negara, perkebunan, dan lain sebagainya. Sumber : KDA Tahun 2021.

5. Potensi Pengembangan Wilayah

Gambaran mengenai eksisting geografis Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa daerah ini memiliki potensi yang sangat besar diberbagai sektor ekonomi. Letak geostrategis Kabupaten Konawe di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sangat menguntungkan karena Kabupaten Konawe menjadi urat nadi aktifitas lalu lintas peredaran barang dan jasa baik antar daerah maupun lintas daerah provinsi. Disamping itu keunggulan komparatif daerah ini terletak pada sumber daya alam yang dimilikinya. Struktur geologi tanah, potensi oceanografi, topografi wilayah, potensi hidrologi didukung dengan klimataolgi wilayah serta penggunaan lahan yang ada hingga kini menjadi perpaduan sumber daya yang sangat mumpuni untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi terutama dibidang pertanian dalam arti luas. Hingga saat ini potensi-potensi tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Konawe namun masih perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi yang ada tersebut sehingga masyarakat dapat menerima manfaat yang maksimal atas sumber daya yang dimiliki daerah ini.

6. Peta Kabupaten Konawe



Gambar 4.1. Peta Kab. Konawe

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengetasan Kemiskinan dan Pengangguran di Kabupaten Konawe

Konawe menjadi salah satu wilayah strategis dalam rangka pengembangan produk-produk UMKM melalui pemasaran yang diyakini akan memperoleh banyak peminat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta pengangguran, terutama di daerah seperti Kabupaten Konawe. Berikut adalah beberapa poin hasil wawancara dari salah satu pelaku usaha home Industri dengan Bapak Dewa mengungkapkan bahwa yang dapat menjadi dasar dalam upaya pengembangan UMKM, adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Akses Pemodalan

"Peran Pemerintah dan Lembaga Keuangan: Pemerintah dan lembaga keuangan dapat berperan dalam menyediakan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau bagi UMKM. Ini bisa berupa kredit mikro dengan bunga rendah, program pembiayaan khusus, atau kemitraan dengan lembaga keuangan untuk menyediakan modal ventura. Kemudiannya menurutnya terkait Program Subsidi dan Bantuan: Subsidi bunga atau hibah bisa diberikan untuk membantu UMKM yang baru berkembang atau yang terdampak oleh kondisi ekonomi yang sulit".

2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

"Pelatihan dan Pendidikan yaitu memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM mengenai manajemen usaha, pemasaran, keuangan, dan keterampilan teknis lainnya akan meningkatkan daya saing mereka. Kemudian Pendampingan dan Mentorship ialah

menyediakan pendampingan oleh para ahli dan pelaku usaha sukses bisa menjadi langkah strategis untuk membantu UMKM bertumbuh”.

3. Peningkatan Akses Pasar

“Digitalisasi UMKM untuk mendorong UMKM untuk memanfaatkan platform digital untuk pemasaran produk. Ini termasuk penggunaan e-commerce dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar. Kemudian untuk Promosi Produk Lokal ialah Pemerintah daerah bisa membantu dalam promosi produk UMKM di pasar lokal, nasional, maupun internasional melalui pameran, bazar, atau kegiatan promosi lainnya”.

4. Penyediaan Infrastruktur Pendukung

“Infrastruktur Fisik yaitu Penyediaan infrastruktur seperti pasar tradisional, pusat grosir, serta fasilitas produksi dan distribusi yang memadai akan mendukung kelancaran operasional UMKM dan yang kedua Infrastruktur Teknologi yaitu akses terhadap internet yang cepat dan stabil sangat penting bagi UMKM, terutama yang bergerak dalam bidang e-commerce”.

5. Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung

“Perbaikan Regulasi ialah menyederhanakan prosedur perizinan, menurunkan biaya registrasi usaha, dan mengurangi beban pajak bagi UMKM merupakan langkah yang bisa diambil untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif. Untuk Kebijakan Proteksi dan Insentif ialah Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang melindungi produk lokal dari persaingan dengan produk impor yang tidak sehat serta memberikan insentif pajak bagi UMKM yang berhasil menciptakan lapangan kerja baru”.

6. Kolaborasi dan Kemitraan

“Kemitraan dengan Sektor Swasta: Mendorong kolaborasi antara UMKM dengan perusahaan besar atau pelaku usaha yang lebih mapan untuk alih teknologi, peningkatan kapasitas produksi, dan akses pasar yang lebih luas. Kemudian Kemitraan dengan Akademisi

ialah menjalin kerjasama dengan universitas atau lembaga riset untuk pengembangan produk baru, peningkatan kualitas produk, dan penelitian pasar bisa menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing UMKM”.

7. Monitoring dan Evaluasi

“Yaitu Pelacakan Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan monitoring berkala terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Konawe. Data ini bisa digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah diterapkan dan menentukan langkah-langkah perbaikan”.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini diharapkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Konawe dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.” (wawancara 20/08/2024).

Saat ini Pemerintah Kabupaten Konawe sangat memperhatikan dan mengembangkan UMKM di Kabupaten Konawe dalam hal tempat dan melaksanakan kegiatan even-even bazar bagi pelaku UMKM yang berada di Kabuapten Konawe. Wawancara dengan Bapak Sabang sebagai Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindak) Kabupaten Konawe. “Merangkum informasi dari wawancara dengan Bapak Sabang sebagai Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindak) Kabupaten Konawe. Berdasarkan penjelasan beliau, berikut adalah gambaran umum mengenai Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Kabupaten Konawe selama ini:

1. Jumlah IKM dan UKM:

- Terdapat cukup banyak IKM dan UKM yang berkembang di Kabupaten Konawe.
- Sebagian besar merupakan usaha-usaha rumahan dan industri kecil berbasis pertanian, perikanan, serta pengolahan hasil alam lokal.

2. Jenis Produk:

- Produk-produk yang dihasilkan IKM dan UKM di Kabupaten Konawe umumnya memanfaatkan sumber daya alam lokal, seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan pengolahan hasil hutan.
- Beberapa contoh produk unggulan adalah produk pangan olahan, kerajinan tangan, dan aneka pengolahan hasil ikan dan hasil laut.

3. Tantangan dan Kendala:

- Permodalan dan akses pembiayaan masih menjadi kendala utama bagi sebagian besar IKM dan UKM.
- Pengetahuan dan keterampilan manajemen usaha, pemasaran, serta pengembangan produk juga masih perlu ditingkatkan.
- Infrastruktur dan fasilitas pendukung bagi IKM dan UKM di beberapa wilayah masih terbatas.

4. Peran Pemerintah:

- Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe terus berupaya memberikan dukungan dan pembinaan bagi pengembangan IKM dan UKM, antara lain melalui program pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi.
- Berbagai program bantuan, baik permodalan maupun pengembangan kapasitas, juga telah disalurkan kepada IKM dan UKM.

Secara keseluruhan, IKM dan UKM di Kabupaten Konawe memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, namun masih memerlukan dukungan dan pembinaan yang lebih intensif dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. "Berdasarkan informasi dari wawancara dengan Bapak Sabang, berikut adalah beberapa langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe untuk meningkatkan keterampilan manajemen usaha bagi IKM dan UKM:

1. Pelatihan Manajemen Usaha

"Pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan pelatihan-pelatihan terkait manajemen usaha, seperti pelatihan kewirausahaan, perencanaan bisnis, administrasi keuangan, dan lain-lain. Kedua Pelatihan-pelatihan ini diikuti oleh para pelaku IKM

dan UKM dengan tujuan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha secara professional”.

2. Pendampingan dan Konsultasi Usaha

“Selain pelatihan, pemerintah daerah juga menyediakan layanan pendampingan dan konsultasi usaha bagi IKM dan UKM. Kedua Pelaku usaha dapat berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan bisnisnya dan mendapatkan saran/solusi dari pendamping yang kompeten”.

3. Fasilitasi Akses Informasi dan Jejaring Usaha

“Pemerintah daerah berupaya memfasilitasi akses IKM dan UKM terhadap informasi-informasi terkait pasar, teknologi, regulasi, dan lain-lain yang dapat mendukung pengembangan usaha. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi pertemuan dan kerjasama antar pelaku IKM dan UKM, sehingga dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman”.

4. Pengembangan Kelembagaan Usaha

“Pemerintah mendorong pembentukan dan penguatan kelembagaan usaha, seperti koperasi dan asosiasi, yang dapat menjadi wadah bagi IKM dan UKM untuk saling bertukar informasi, mengakses pembiayaan, dan meningkatkan daya saing.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe berusaha membantu meningkatkan keterampilan manajemen usaha bagi IKM dan UKM, sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha tersebut.”(22/8/2024). Dari informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Sabang, berikut adalah beberapa contoh sukses IKM dan UKM di Kabupaten :

1. Kerajinan Anyaman Pandan

- Terdapat beberapa IKM di Konawe yang berhasil mengembangkan usaha kerajinan anyaman berbahan baku pandan.
- Produk-produk anyaman pandan, seperti tas, tikar, dan perabot rumah tangga, telah mampu menembus pasar lokal maupun regional.

- Beberapa IKM kerajinan anyaman pandan bahkan telah mampu melakukan ekspor ke luar negeri.

2. Dodol Ikan Tuna

- Salah satu UKM di Konawe berhasil mengembangkan usaha produksi dodol berbahan baku ikan tuna.
- Produk dodol ikan tuna ini tidak hanya diminati di pasar lokal, tetapi juga telah diekspor ke beberapa daerah di luar Sulawesi Tenggara.
- UKM ini mampu mempekerjakan beberapa tenaga kerja di sekitar wilayahnya.

3. Sentra Industri Pengolahan Ikan

- Di beberapa wilayah Konawe, terdapat sentra-sentra IKM yang fokus pada pengolahan hasil perikanan, seperti ikan asap, ikan asin, dan ikan kaleng.
- Beberapa sentra industri pengolahan ikan ini telah mampu memasarkan produknya tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga ke pasar regional maupun nasional.
- Keberadaan sentra-sentra industri pengolahan ikan ini telah memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar.

4. Olahan Rumput Laut

- Konawe juga memiliki IKM yang berhasil mengembangkan produk-produk olahan berbahan baku rumput laut, seperti dodol, manisan, dan permen.
- Beberapa produk olahan rumput laut ini telah mendapatkan label sertifikasi halal dan telah dipasarkan di luar daerah.

Diatas adalah beberapa contoh-contoh sukses IKM dan UKM di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Konawe memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan industri dan usaha kecil menengah berbasis sumber daya lokal.(22/8/2024).

Berikut hasil wawancara dengan ibu jumintan sebagai pengusaha rumahan terkait beberapa tantangan dalam melakukan kegiatan menjadi wirausaha antara lain sebagai berikut :

"Akses permodalan yang terbatas: Ibu Juminten menjelaskan bahwa perempuan seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses

sumber-sumber permodalan untuk mengembangkan industri, baik dari lembaga keuangan formal maupun informal. Hal ini dapat menjadi kendala bagi perempuan untuk memulai atau memperluas usaha mereka.

"Kurangnya pelatihan dan pendampingan: Menurut Ibu Juminten, masih terbatasnya program pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, dan pengembangan kapasitas yang diperuntukkan secara khusus bagi perempuan. Hal ini membuat perempuan kurang terampil dalam mengelola dan mengembangkan industri mereka.

"Beban ganda peran: Ibu Juminten menyoroti bahwa banyak perempuan harus membagi waktu dan tenaga mereka antara mengurus rumah tangga dan menjalankan usaha industri. Hal ini dapat menghambat fokus dan produktivitas mereka dalam mengembangkan industri.

"Rendahnya kepercayaan diri: Ibu Juminten mengungkapkan bahwa masih banyak perempuan yang kurang percaya diri dalam memasuki dan bersaing di sektor industri yang didominasi oleh laki-laki. Hal ini dapat memengaruhi keberanian mereka untuk mengambil risiko dan berinovasi.

"Terbatasnya jejaring dan akses pasar: Menurut Ibu Juminten, perempuan pengusaha industri seringkali memiliki keterbatasan dalam membangun jejaring bisnis dan mengakses pasar yang lebih luas untuk memasarkan produk mereka".

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berwirausaha tentu akan menghadapi begitu banyak masalah dan tantangan yang harus dilewati. Maka dari itu memerlukan ketekunan, kesabaran dan kegigihan dalam menjalaninya agar dapat memperoleh sesuai yang kit inginkan.

Kemudian selanjutnya hasil wawancara tentang peran perempuan dalam meningkatkan kapasitas industri kecil yang di jalankan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Juminten, terkait peran perempuan dalam meningkatkan kapasitas industri kecil yang beliau jalankan adalah sebagai berikut:

1. Peran Inovasi dan Kreativitas:

"Ibu Juminten menjelaskan bahwa perempuan sering kali memiliki kemampuan inovatif dan kreatif dalam mengembangkan

produk-produk industri kecil. Beliau mengatakan, "Kami perempuan cenderung lebih detail dan teliti dalam menciptakan produk-produk baru yang unik dan menarik bagi konsumen".

2. Peran Manajemen dan Efisiensi:

"Menurut Ibu Juminten, perempuan umumnya lebih cakap dalam mengelola operasional industri kecil secara efisien. "Kami perempuan biasanya lebih cermat dalam mengelola keuangan, persediaan, dan proses produksi agar tidak banyak pemborosan," ungkap Ibu Juminten.

3. Peran Diversifikasi Produk:

"Ibu Juminten berbagi bahwa perempuan sering kali lebih responsif terhadap preferensi pasar dan tren konsumen. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan diversifikasi produk secara lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis".

4. Peran Pemberdayaan Komunitas:

"Ibu Juminten menekankan bahwa perempuan pengusaha industri kecil umumnya lebih proaktif dalam memberdayakan komunitas, misalnya dengan melibatkan tenaga kerja lokal, terutama ibu-ibu rumah tangga. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar".

5. Peran Kepemimpinan dan Motivasi:

"Menurut Ibu Juminten, perempuan pengusaha industri kecil seringkali dapat berperan sebagai pemimpin yang inspiratif dan memotivasi karyawan, terutama sesama perempuan, untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi mereka".

Selain itu kami juga melanjutkan wawancara dengan Ibu Saoni dari Desa Baeni beliau telah menekuni usaha anyaman Tikar, Topi dan Tudung selama lima belas tahun, berikut hasil wawancaranya:

1. Peran Perempuan dalam IKM Anyaman:

"Menurut Ibu Saoni, perempuan memiliki ketelitian dan keterampilan yang baik dalam membuat produk anyaman yang rumit dan bernilai seni tinggi. Beliau menyatakan bahwa banyak pengrajin anyaman di daerahnya adalah perempuan yang memiliki keahlian turun-temurun. Serta menurutnya perempuan pengrajin juga berperan dalam menjaga kualitas produk dan memenuhi pesanan tepat waktu".

2. Tantangan yang Dihadapi:

"Ibu Saoni mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama adalah akses permodalan yang terbatas untuk mengembangkan usaha. Selain itu, persaingan dengan produk-produk impor juga menjadi tantangan tersendiri. Kami juga menyoroti perlunya peningkatan kemampuan pemasaran dan penetrasi pasar yang lebih luas".

3. Peran Pemerintah dan Dukungan Kelembagaan:

"Menurut Ibu Saoni, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan promosi produk lokal sangat dibutuhkan. Kami juga menyarankan agar ada lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi pengrajin dan kemitraan dengan perguruan tinggi dan LSM juga dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas inovasi dan manajemen usaha".

Secara keseluruhan, wawancara dengan Ibu Saoni mengungkapkan potensi besar perempuan sebagai pengrajin anyaman dalam IKM, namun juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang perlu mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak terkait.

Hal senada juga diungkapkan Ibu Hj. Borlian dari Desa Anggopiu beliau telah menekuni usaha kain tenun selama dua puluh tahun, berikut hasil wawancaranya:

1. Peran Perempuan dalam Industri Tenun:

"Menurut Ibu Hj Borlian, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam industri tenun tradisional. Sebagian besar pengrajin tenun adalah perempuan yang memiliki keahlian turun-temurun dalam menenun kain dengan motif dan corak yang khas. Perempuan juga berperan dalam pewarnaan, pembuatan benang, dan finishing produk tenun".

2. Tantangan yang Dihadapi:

"Ibu Hj. Borlian mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama adalah persaingan dengan produk-produk tenun modern dan massal. Kendala permodalan juga menjadi hambatan bagi pengembangan usaha, terutama untuk investasi alat tenun yang lebih modern. Selain itu, pemasaran produk tenun tradisional ke pasar yang lebih luas juga menjadi tantangan tersendiri".

3. Peran Ibu Hj Borlian dalam Pengembangan Industri:

"Sebagai seorang pengrajin senior, Ibu Hj Borlian berperan aktif dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan menenun kepada generasi muda, terutama perempuan. Kami juga berupaya melakukan inovasi produk dengan memadukan teknik tenun tradisional dengan desain modern, agar dapat bersaing di pasar. Selain itu kami juga terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui usaha tenun".

4. Harapan dan Saran:

"Ibu Hj Borlian berharap adanya dukungan dan kebijakan pemerintah yang lebih memihak pada pengembangan industri tenun tradisional. Kami menyarankan perlunya peningkatan akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan bagi pengrajin tenun, khususnya perempuan. Selain itu kami juga menekankan pentingnya promosi dan pemasaran produk tenun tradisional ke pasar yang lebih luas".

Secara keseluruhan, wawancara dengan Ibu Hj Borlian mengungkapkan peran strategis perempuan dalam industri tenun tradisional serta berbagai tantangan yang masih dihadapi untuk pengembangan industri ini.

Berikutnya Wawancara dengan Ibu Wengami Sebagai Pengrajin Sapu Ijuk, Lap Kaki, Sapu Lidi dan Sulam Taplak Meja selama sepuluh tahun dari desa Tamesandi, berikut hasil wawancara dengan Ibu Wengami:

1. Peran Perempuan dalam Industri Kerajinan:

"Menurut Ibu Wengami, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam industri kerajinan tangan. Sebagian besar pengrajin kerajinan tangan adalah perempuan yang memiliki ketelitian, kesabaran, dan keterampilan yang baik. Perempuan juga berperan dalam menjaga kualitas produk, memenuhi pesanan tepat waktu, dan melakukan inovasi desain".

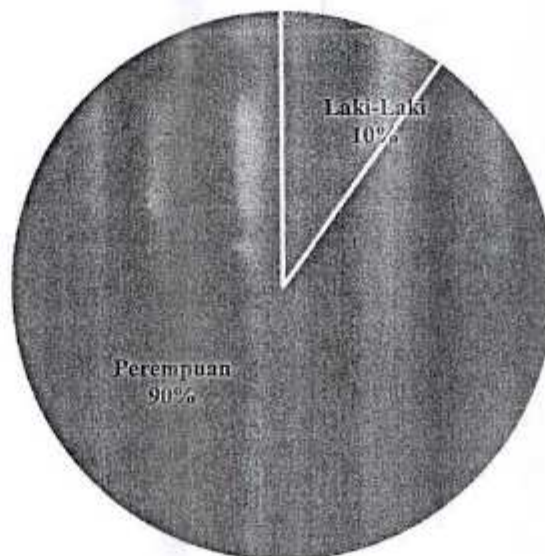
2. Kapasitas Kelembagaan Perempuan:

"Ibu Wengami menyatakan bahwa perempuan pengrajin telah membentuk kelompok-kelompok usaha dan koperasi untuk meningkatkan kapasitas dan akses pasar mereka. Menurut kami melalui kelembagaan tersebut, perempuan pengrajin dapat saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, serta mendapatkan dukungan untuk pengembangan usaha. Serta kelembagaan perempuan juga berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal".

3. Tantangan yang Dihadapi:

"Menurut Ibu Wengami mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama adalah persaingan dengan produk-produk impor yang lebih murah. Selain itu, akses permodalan yang terbatas juga menjadi kendala bagi pengembangan usaha. Beliau juga menyoroti perlunya peningkatan kemampuan pemasaran dan penetrasi pasar yang lebih luas.

Persentase UMKM Laki-Laki dan Perempuan



Gambar 5.1. Presentase UMKM Laki-Laki & Perempuan

Dalam gambar persentase diatas kita bisa melihat persentase UMKM di Kabupaten Konawe sesuai dengan data lapangan yang ada dimana UMKM Laki-laki mendapat persentase 10 % yang melakukan kegiatan UMKM dan UMKM Perempuan 90 %. ini berarti bahwa UMKM di Kabupaten Konawe peran perempuan sangat besar dan penting dalam hal pengelolaan Home Industri dalam memajukan perekonomian keluarga dan ini menjadi sangat penting pemerintah untuk memperhatikan hal tersebut diatas agar para UMKM yang ada di Kabupaten Konawe bisa menjadi rool model terhadap kabupaten yang lain dalam memajukan perekonomian di Kabupaten Konawe.

Adapun Analisis SWOT yang kami dapatkan dilapangan sebagai berikut:

1. Kelebihan yang ditemukan:
 - Perempuan memiliki keahlian dan keterampilan dalam memproduksi produk-produk industri kecil yang berkualitas, seperti kerajinan tangan dan makanan olahan.
 - Perempuan memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengorganisir kelompok usaha industri kecil.
 - Perempuan menunjukkan antusiasme dan komitmen yang tinggi dalam

mengembangkan industri kecil.

2. Kekurangan yang teridentifikasi:

- Kurangnya akses perempuan terhadap modal, teknologi, dan informasi pasar yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha.
- Terbatasnya kemampuan manajerial dan kewirausahaan di kalangan perempuan pengusaha industri kecil.
- Rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh perempuan pelaku industri kecil.

3. Tantangan yang dihadapi:

- Persaingan pasar yang ketat dengan produk-produk industri besar.
- Kesulitan menembus pasar yang lebih luas di luar wilayah lokal.
- Perubahan preferensi konsumen yang cepat dan sulit diantisipasi.

4. Kendala struktural:

- Kurangnya dukungan kebijakan dan program pemberdayaan yang berpihak pada perempuan pelaku industri kecil.
- Minimnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan kelompok usaha perempuan.
- Infrastruktur dan fasilitas penunjang yang belum memadai di wilayah pedesaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang potensi dan permasalahan yang dihadapi perempuan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Konawe.

Selain itu ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan manajerial perempuan dalam industri kecil di Kabupaten Konawe:

1. Peningkatan akses perempuan terhadap pelatihan dan pengembangan kapasitas bidang manajerial dan kewirausahaan:

- Menyelenggarakan pelatihan terpadu yang mencakup pengelolaan keuangan, pemasaran, inovasi produk, dan manajemen operasional.
- Melibatkan perempuan pengusaha industri kecil dalam program magang atau studi banding ke usaha-usaha yang lebih maju.

- Memberikan pendampingan dan konsultasi berkelanjutan dari tenaga ahli terkait manajemen bisnis.
2. Fasilitasi akses perempuan pada sumber-sumber permodalan:
 - Memperluas skema pembiayaan mikro dan kredit lunak yang dapat diakses oleh kelompok usaha perempuan.
 - Menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan pengusaha industri kecil.
 - Mendorong pemerintah daerah menyediakan bantuan modal awal bagi kelompok usaha perempuan.
 3. Peningkatan akses perempuan pada informasi pasar dan teknologi:
 - Memfasilitasi perempuan pengusaha industri kecil untuk terhubung dengan jaringan pemasaran yang lebih luas, termasuk pemanfaatan platform digital.
 - Memberikan dukungan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha industri kecil yang dikelola perempuan.
 - Mendorong pemanfaatan inovasi dan penerapan standar kualitas produk.

Implementasi rekomendasi ini secara sinergis antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan kelompok usaha perempuan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas manajerial perempuan serta memperkuat daya saing industri kecil yang digerakkan oleh perempuan di Kabupaten Konawe.

2. Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Konawe (2016-2023)

Garis kemiskinan di Kabupaten Konawe mengalami variasi dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa garis kemiskinan untuk tahun 2020 adalah Rp 354.696,00 per kapita per bulan⁵. Angka ini menjadi acuan untuk mengukur jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan penelitian terkait, berikut adalah perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Konawe dari 2016 hingga 2023:

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)
2016	285.184	16,76
2017	305.720	14,88
2018	316.736	12,42
2019	323.291	9,89
2020	345.291	10,54
2021	358.232	10,86
2022	-	12,57 (data terbaru)
2023	-	13,02 (data terbaru)

Tabel 5.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Konawe, BPS

Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Konawe meningkat kembali pada tahun-tahun terakhir setelah penurunan yang signifikan pada periode sebelumnya. Analisis Kategori Kemiskinan Penduduk miskin di Konawe dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok yaitu 1). Sangat Miskin yaitu Konsumsi kalori kurang dari 1200 kalori per orang per hari. 2). Miskin yaitu Konsumsi makanan kurang dari 2200 kalori per kapita per hari atau pengeluaran kurang dari Rp.226.200 per bulan. 3). Rentan Miskin ialah Penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan, berisiko jatuh ke dalam kemiskinan¹.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecamatan dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Wawonii Utara dengan sekitar 23,29%¹. Secara keseluruhan, kondisi kemiskinan di Konawe relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sulawesi Tenggara. Tren kemiskinan di Konawe menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun-tahun terakhir. Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan harus difokuskan pada peningkatan akses terhadap sumber daya dan program-program sosial yang efektif.

Berdasarkan data Kabupaten Konawe Dalam Angka Tahun 2024 data garis Kemiskinan pada tahun 2023 mencapai 13,02 %, dibandingkan data tahun 2022 jumlah data kemiskinan mencapai 12,57% dan begitu juga data pengangguran terbuka Kabupaten Konawe pada tahun 2023 mencapai 3,09 % dibandingkan tahun 2022 mencapai 2,73 %, ini berarti bahwa data kemiskinan dan Pengangguran di Kabupaten Konawe ada peningkatan dan ini bisa memberikan dampak yang kurang baik dalam perputaran perekonomian di Kabupaten dengan adanya kegiatan penelitian mengenai pengembangan UMKM dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Konawe akan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat kabupaten Konawe terutama dalam hal ini pemerintah dan UMKM saling berkolaborasi dalam mewujudkan visi dan misi daerah kedepan akan lebih maju.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Pengembangan UMKM dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran di Kabupaten Konawe

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Konawe memiliki peran krusial dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Sektor UMKM di Indonesia menyerap lebih dari 99% tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, pengembangan UMKM dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Konawe memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran. Berikut adalah beberapa cara bagaimana pengembangan UMKM dapat berkontribusi dalam dua aspek ini:

1). Penciptaan Lapangan Kerja

UMKM adalah salah satu sektor yang paling cepat dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan memberikan dukungan kepada UMKM, seperti pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan bantuan teknis, lebih banyak usaha kecil dapat dibuka dan berkembang. Hal ini secara

langsung akan menyerap tenaga kerja lokal, yang pada gilirannya mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Konawe. Selain itu penciptaan lapangan kerja adalah salah satu aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara. Dalam penelitian ini, kami akan menjelaskan pentingnya penciptaan lapangan kerja, tantangan yang dihadapi, dan beberapa strategi untuk meningkatkan kesempatan kerja. Pentingnya Penciptaan Lapangan Kerja: Mengurangi Pengangguran: Lapangan kerja yang tersedia memberikan kesempatan bagi individu untuk memperoleh penghasilan yang stabil, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan memberikan akses terhadap pendapatan, manfaat sosial, dan jaminan keamanan ekonomi, yang meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Mendorong Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi: Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan digunakan untuk konsumsi barang dan jasa, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan sektor bisnis dan ekonomi secara keseluruhan. Meningkatkan Produktivitas dan Inovasi: Pekerjaan yang menantang dan bermanfaat mendorong pengembangan keterampilan dan inovasi, yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara dalam pasar global. Tantangan dalam Penciptaan Lapangan Kerja: Perubahan Teknologi: Otomatisasi dan digitalisasi dapat mengurangi permintaan tenaga kerja dalam beberapa sektor, meningkatkan tantangan dalam menciptakan pekerjaan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Ketidakcocokan Keterampilan: Ada seringkali kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dan keterampilan yang diminta oleh pasar tenaga kerja, yang dapat menghambat penciptaan lapangan kerja yang efektif. Ketidakpastian Ekonomi: Ketidakstabilan ekonomi global, resesi, dan fluktuasi pasar dapat menghambat pertumbuhan perusahaan dan investasi, yang pada gilirannya mempengaruhi penciptaan lapangan kerja. Hambatan Regulasi: Beberapa peraturan pemerintah, seperti pajak tinggi

atau birokrasi yang berlebihan, dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan bisnis dan penciptaan lapangan kerja.

Strategi untuk Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja:

Pendidikan dan Pelatihan: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat membantu mengurangi ketidakcocokan keterampilan dan meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas.

Mendorong Kewirausahaan: Membuat lingkungan yang kondusif untuk kewirausahaan dapat mendorong pertumbuhan bisnis baru dan penciptaan lapangan kerja.

Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti insentif fiskal dan kebijakan moneter yang akomodatif, dapat merangsang investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Promosi Sektor Ekonomi yang Berpotensi Tinggi: Mendukung sektor-sektor ekonomi yang berpotensi tinggi, seperti teknologi informasi, energi terbarukan, dan manufaktur canggih, dapat membuka peluang baru untuk penciptaan lapangan kerja.

Kerjasama Publik-Privat: Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dapat memfasilitasi pembentukan kebijakan dan program yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja adalah elemen penting dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Meskipun dihadapi dengan tantangan seperti perubahan teknologi dan ketidakcocokan keterampilan, strategi-strategi seperti pendidikan, dukungan kewirausahaan, dan kebijakan ekonomi yang tepat dapat membantu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang holistik dan kerjasama lintas sektor, penciptaan lapangan kerja dapat menjadi motor bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

2). Peningkatan Pendapatan Masyarakat

UMKM sering kali melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja dan mitra bisnis. Ketika UMKM berkembang, pendapatan masyarakat juga ikut meningkat, terutama di kalangan kelompok yang sebelumnya kurang terlayani oleh pasar formal. Pendapatan yang lebih tinggi ini membantu

mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe. Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan tujuan yang penting dalam pembangunan suatu negara. Melalui strategi dan upaya yang terencana dan berkelanjutan, pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan yang berkelanjutan. Pendidikan, keterampilan, peluang kerja, dan pembangunan infrastruktur adalah beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan pendampingan, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur yang baik, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dan pendapatannya. Peningkatan pendapatan masyarakat juga akan berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan, karena masyarakat dengan pendapatan yang tinggi akan mendorong konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

3). Pengembangan Ekonomi Lokal

UMKM berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Ketika UMKM berkembang, permintaan akan produk dan jasa lokal meningkat, yang secara tidak langsung mendukung sektor lain di daerah tersebut. Hal ini menciptakan efek domino yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah proses pembangunan ekonomi yang dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PEL bertujuan untuk: Meningkatkan potensi lokal, Menanggulangi kelemahan lokal, Menciptakan lapangan kerja, Meningkatkan taraf hidup masyarakat, Membangun kemampuan perekonomian lokal yang berkelanjutan. PEL dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: Mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal, Membentuk kelembagaan baru, Menciptakan industri baru. PEL dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti: Meningkatkan pendapatan masyarakat, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Mengurangi pengangguran. Keberhasilan dan

keberlanjutan PEL sangat ditentukan oleh adanya kerja sama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

4). Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

Kabupaten Konawe memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang dapat dikembangkan melalui UMKM, seperti produk kerajinan, pertanian, dan pariwisata. Dengan mendorong UMKM yang memanfaatkan sumber daya lokal, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut tetap berada di daerah dan dinikmati oleh masyarakat setempat. Sumber daya lokal pada hakikatnya merupakan suatu modal bagi masyarakat dalam pemenuhan pembangunan menuju suatu masyarakat yang makmur dan sejahtera, dengan potensi dan budaya yang ada seharusnya dapat menjadi upaya dalam menangani masalah-masalah yang ada di masyarakat. Namun biasanya sumber daya lokal cenderung tidak mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Untuk itu diperlukan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya memaksimalkan potensi-potensi yang ada sehingga menghasilkan suatu nilai ekonomi bagi masyarakat. Dalam mengembangkan potensi lokal masyarakat dan menumbuhkan masyarakat yang makmur dan sejahtera diperlukan partisipasi langsung dari masyarakat, hal ini dikarenakan peran serta masyarakat untuk pemberdayaan memiliki pengaruh yang penting untuk keberhasilan suatu program yang dilaksanakan oleh lembaga atau lembaga pemberdayaan masyarakat. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat adalah upaya dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

5). Inklusi Keuangan

Pengembangan UMKM juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Melalui program-program seperti akses ke kredit

mikro dan layanan perbankan lainnya, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses keuangan formal dapat memulai dan mengembangkan usaha mereka. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Dibentuknya program inklusi keuangan ini adalah untuk menutup kesenjangan akan akses layanan keuangan antara unbanked society (masyarakat yang belum memiliki rekening bank) dengan masyarakat yang telah berhasil mengakses layanan bank. Peningkatan sistem keuangan yang inklusif diharapkan mampu untuk menutup angka kesenjangan tersebut. Dengan begitu, akan semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati akses layanan keuangan formal secara aman dan terjangkau. Tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan tabungan secara formal, namun inklusi keuangan juga mencakup akses akan produk dan layanan keuangan lainnya, seperti asuransi, dana pensiun, hingga investasi.

Beberapa alasan penyebab masyarakat belum mendapatkan akses terhadap jasa, produk, atau layanan keuangan formal, yaitu:

1. price barrier (keterbatasan akan jangkauan biaya)
2. information barrier (keterbatasan informasi)
3. design product barrier (produk, sistem, atau layanan keuangan formal yang tidak sesuai dengan kebutuhan) dan,
4. channel barrier (sarana yang tidak sesuai).

Keuangan yang inklusif tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai regulator utama, namun juga melibatkan pihak swasta hingga masyarakat yang akan menjadi konsumen dari jasa, produk, dan layanan keuangan formal ini. Manfaat dari inklusi keuangan yang diharapkan, antara lain yaitu :

1. terciptanya efisiensi ekonomi,
2. terbangunnya stabilitas sistem keuangan,
3. tersedianya potensi pasar baru bagi perbankan,
4. terciptanya pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional yang berkelanjutan,

5. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target program inklusi keuangan, sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan.

6). Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan

Dengan program pelatihan dan pendampingan yang difokuskan pada UMKM, masyarakat di Kabupaten Konawe dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam berbisnis. Keterampilan yang lebih baik tidak hanya meningkatkan produktivitas UMKM tetapi juga memperluas kesempatan kerja bagi orang-orang yang terlatih, mengurangi tingkat pengangguran.

Peningkatan kapasitas atau *capacity building* adalah proses untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu, organisasi, atau komunitas. Tujuannya adalah agar mereka dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, menghadapi tantangan, dan melaksanakan tugas.

Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, seperti:

1. Pelatihan perorangan atau kelompok, baik tatap muka maupun daring
2. Mentoring, yaitu bimbingan yang intensif dan personal untuk membangun pengetahuan dan keterampilan
3. Pengembangan keterampilan teknis, seperti komputasi awan atau pengumpulan dan analisis data
4. Pengembangan keterampilan nonteknis, seperti presentasi, pemikiran strategis, serta manajemen waktu
5. Penguatan struktur dan sistem, yaitu perbaikan atau pengembangan sistem dan struktur organisasi
6. Peningkatan sumber daya, seperti pengelolaan sumber daya keuangan, manusia, dan material
7. Pengembangan kebijakan dan tata kelola

Peningkatan kapasitas dapat memberikan banyak manfaat, seperti:

1. Menjelaskan misi, visi, dan nilai-nilai organisasi
2. Memungkinkan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan

3. Memperkuat kemampuan individu atau kelompok dalam menggunakan sumber daya yang ada.

7). Tantangan yang Dihadapi

Meskipun UMKM memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan akses terhadap permodalan, kurangnya pelatihan yang memadai, infrastruktur yang belum memadai, serta ketidakmampuan bersaing di pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan perlu berkolaborasi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Secara keseluruhan, pengembangan UMKM di Kabupaten Konawe dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran jika didukung oleh kebijakan dan program yang tepat dari pemerintah serta partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta.

Bisnis UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan bisnisnya. Terlebih dalam situasi seperti sekarang ini, pelaku UMKM harus memperhatikan berbagai faktor agar bisnisnya tetap berjalan dan berkembang. Berikut adalah beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu :

1. Persaingan yang Ketat Persaingan yang ketat merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Saat ini, banyak pelaku usaha yang menawarkan produk atau jasa yang sama dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu berinovasi dalam hal produk atau jasa yang ditawarkan agar bisa bersaing dengan kompetitor.
2. Perubahan Kebijakan Pemerintah Perubahan kebijakan pemerintah sering kali menjadi masalah bagi pelaku UMKM. Kebijakan yang tiba-tiba diubah atau bahkan dicabut bisa mempengaruhi bisnis UMKM. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memperhatikan setiap perubahan kebijakan dan mengambil tindakan yang tepat agar bisnisnya tetap berjalan.

3. Modal yang Terbatas Modal yang terbatas menjadi salah satu tantangan besar bagi pelaku UMKM. Sebagian besar pelaku UMKM memulai bisnisnya dengan modal yang minim, sehingga sulit untuk mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu mencari solusi dalam memperoleh modal tambahan seperti mencari investor atau pinjaman modal dari bank.
4. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih belum memanfaatkan teknologi dengan baik. Hal ini bisa mempengaruhi produktivitas dan efisiensi bisnis. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memperhatikan penggunaan teknologi agar bisa bersaing dengan kompetitor.
5. Kesulitan Mempertahankan Karyawan Kesulitan mempertahankan karyawan menjadi tantangan lain bagi pelaku UMKM. Saat ini, banyak karyawan yang lebih memilih bekerja di perusahaan besar yang menawarkan gaji dan tunjangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu mencari cara untuk mempertahankan karyawan seperti memberikan pelatihan atau meningkatkan kualitas lingkungan kerja.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan bisnisnya, pelaku UMKM bisa mengatasi hal tersebut dengan cara yang tepat. Dengan berinovasi, memperhatikan kebijakan pemerintah, mencari modal tambahan, memanfaatkan teknologi, dan mempertahankan karyawan, pelaku UMKM bisa meraih kesuksesan dalam bisnisnya.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan UMKM Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kabupaten Konawe

Pengembangan UMKM di Kabupaten Konawe dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan UMKM serta kontribusinya terhadap perekonomian lokal. Berikut

adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi pengembangan UMKM di daerah tersebut:

1). Akses Permodalan

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM adalah akses terhadap permodalan. Ketersediaan dana untuk memulai dan mengembangkan usaha sangat penting. Namun, seringkali UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan karena kurangnya jaminan, riwayat kredit, atau ketidaktahuan tentang opsi permodalan yang tersedia.

Akses permodalan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Konawe merupakan isu penting yang mempengaruhi daya saing dan keberlangsungan usaha. Berikut adalah penjelasan mengenai kondisi dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM di daerah ini. Adapun Tantangan Akses Permodalan yaitu : 1) Kendala Pembiayaan: Banyak pelaku UMKM di Konawe menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan formal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya informasi mengenai produk keuangan dan prosedur pengajuan pinjaman. 2) Bunga Pinjaman Tinggi: Meskipun terdapat lembaga-lembaga yang menawarkan pinjaman, bunga yang dikenakan sering kali masih tinggi, sehingga menyulitkan UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan. 3) Keterbatasan Jaringan dan Pengetahuan: Pelaku UMKM sering kali tidak memiliki jaringan yang cukup untuk mendapatkan informasi terkait peluang pembiayaan. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan juga menjadi hambatan.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan akses permodalan kepada UMKM yaitu sebagai berikut :

1. Program Pemerintah: Pemerintah Kabupaten Konawe telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan akses permodalan, termasuk pelatihan bagi pelaku UMKM dan penyediaan layanan terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka.

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR): Program KUR merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memberikan kredit berbunga rendah kepada UMKM, sehingga mereka dapat lebih mudah mendapatkan modal yang dibutuhkan.
3. Digital Entrepreneurship Academy: Program pelatihan ini memberikan wawasan tentang pengelolaan keuangan digital serta akses informasi permodalan, membantu pelaku UMKM memahami cara mengelola dan mengembangkan usaha mereka secara lebih efektif.
4. Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan: Dinas Koperasi dan UMKM berusaha membangun kemitraan dengan lembaga keuangan untuk memfasilitasi akses kredit bagi pelaku UMKM, serta memastikan transparansi dalam proses pengajuan pinjaman.

Akses permodalan bagi UMKM di Konawe masih menghadapi berbagai tantangan, namun dengan adanya program pemerintah dan inisiatif pelatihan, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah mendapatkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM di daerah ini.

2). Ketersediaan Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, air, dan akses internet, sangat penting untuk mendukung pengembangan UMKM. Di daerah yang infrastrukturnya kurang berkembang, UMKM mungkin menghadapi kesulitan dalam distribusi produk, akses ke pasar, dan mendapatkan bahan baku.

Ketersediaan infrastruktur di Konawe memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berikut adalah beberapa poin utama terkait hal ini:

1. Kawasan Industri Konawe: Kawasan ini telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional, dengan luas 2.253 Ha dan realisasi 1.465 Ha. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air baku, dan

telekomunikasi sangat diperlukan untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing industri.

2. Kendari New Port: Pembangunan pelabuhan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, yang sangat penting bagi distribusi barang dan layanan UMKM. Infrastruktur pelabuhan yang baik dapat mempercepat proses pengiriman dan menekan biaya logistic.
3. Pendataan Infrastruktur: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe melakukan pendataan untuk mengidentifikasi ketersediaan infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan wilayah. Data ini diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung UMKM.

Adapun Dampak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut :

1. Akses Pembiayaan: Dengan adanya infrastruktur yang memadai, UMKM akan lebih mudah mengakses sumber pembiayaan. Hal ini penting untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing mereka di pasar.
2. Kebijakan Pemerintah: Pemerintah telah memberikan berbagai kebijakan untuk mendukung UMKM, termasuk pelonggaran persyaratan kredit dan keringanan pembayaran kredit bagi UMKM yang terdampak pandemi. Penyediaan infrastruktur publik juga menjadi bagian dari strategi ini.
3. Pengembangan Ekonomi Lokal: Ketersediaan infrastruktur yang baik dapat meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Ini juga termasuk dukungan untuk pelatihan keterampilan bagi penduduk setempat agar mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan UMKM.

Meskipun ada banyak upaya untuk meningkatkan infrastruktur, masih terdapat tantangan seperti kualitas jalan yang perlu diperbaiki dan kebutuhan akan fasilitas pengolahan air limbah. Upaya berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mengatasi masalah ini agar potensi UMKM di Konawe dapat dimaksimalkan. Dengan demikian, ketersediaan infrastruktur yang baik di Konawe tidak hanya mendukung

pengembangan UMKM tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional secara keseluruhan.

3). Akses Pasar

Kemampuan UMKM untuk mengakses pasar, baik lokal maupun lebih luas, sangat penting dalam menentukan keberhasilan mereka. Pasar yang terbatas atau persaingan yang ketat dapat menghambat pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas akses pasar, misalnya melalui pemasaran digital, pameran produk, dan kerjasama dengan berbagai pihak.

Kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengakses pasar di Kabupaten Konawe menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang signifikan. Berikut adalah analisis mengenai situasi atau tantangan yang dihadapi UMKM adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Akses Informasi Pasar: Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses informasi pasar yang memadai, termasuk keahlian pemasaran dan perizinan hukum. Hal ini mengakibatkan rendahnya daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif.
2. Infrastruktur Pemasaran yang Tidak Memadai: Kelemahan dalam infrastruktur pemasaran menjadi hambatan bagi UMKM untuk menjangkau konsumen secara efektif. Hal ini mencakup kurangnya fasilitas untuk promosi dan distribusi produk.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki keterampilan manajemen yang memadai, sehingga mereka kesulitan dalam mengelola usaha dan memperluas jaringan.
4. Akses Terbatas ke Pembiayaan: Masalah akses terhadap pendanaan atau kredit menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM, yang sering kali menghambat pertumbuhan usaha mereka.

Peluang untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut :

1. Program Pelatihan dan Pendampingan: Inisiatif seperti Digital Entrepreneurship Academy (DEA) telah dilaksanakan untuk

meningkatkan keterampilan pelaku UMKM di Konawe. Program ini memberikan pelatihan dalam pengelolaan keuangan digital dan pemasaran, yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing mereka di era digital.

2. Pengembangan Produk Lokal: Fokus pada produk lokal dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan daya saing UMKM. Pelatihan berbasis produk lokal menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan keterampilan kewirausahaan masyarakat dan mendukung keberlanjutan ekonomi desa wisata.
3. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Pendidikan: Kerja sama antara pemerintah daerah, universitas, dan komunitas lokal dapat menciptakan ekosistem kewirausahaan yang lebih kuat, mendukung pengembangan produk inovatif, serta memperkuat identitas lokal.
4. Penerapan Teknologi Digital: Adopsi teknologi digital oleh pelaku UMKM dapat membuka akses pasar yang lebih luas, memungkinkan mereka untuk mempromosikan produk melalui platform online dan media sosial.

Meskipun UMKM di Kabupaten Konawe menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pasar, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Melalui pelatihan, pengembangan produk lokal, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, UMKM dapat memperkuat posisi mereka di pasar dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

4). Kualitas Sumber Daya Manusia

Keterampilan dan pengetahuan pemilik serta pekerja UMKM sangat mempengaruhi produktivitas dan inovasi. Pelatihan yang memadai dalam manajemen bisnis, teknologi, serta pengembangan produk dan pemasaran sangat penting untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Keterampilan dan pengetahuan pemilik serta pekerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam meningkatkan kinerja dan daya saing usaha. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa

penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang baik dapat berdampak positif terhadap produktivitas dan keberhasilan UMKM.

Pengaruh Pengetahuan dan Keterampilan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan: Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pemilik UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja mereka. Pemilik yang memiliki pengetahuan tinggi tentang manajemen usaha, pemasaran, dan teknologi informasi cenderung lebih berhasil dalam menjalankan bisnis. Sebuah studi di Kecamatan Guguk menemukan bahwa pengetahuan dan pengalaman kerja berkontribusi sebesar 47% terhadap kinerja UMKM.
2. Keterampilan: Keterampilan kewirausahaan juga sangat penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan yang baik dapat meningkatkan daya saing produk, inovasi, dan kreativitas dalam bisnis. Keterampilan seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk menjadi kunci untuk bertahan di pasar yang kompetitif.

Adapun Program pelatihan keterampilan dan produktivitas dirancang untuk meningkatkan kemampuan pekerja UMKM. Beberapa manfaat dari program ini meliputi:

1. Peningkatan keterampilan: Peserta memperoleh pengetahuan baru yang relevan dengan usaha mereka, termasuk manajemen usaha, strategi pemasaran, dan pengembangan produk.
2. Peningkatan produktivitas: Pelatihan ini membantu pekerja untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk yang ditawarkan.
3. Jaringan bisnis: Program pelatihan juga memberikan kesempatan untuk memperluas jejaring bisnis yang dapat mendukung pertumbuhan usaha.

Keterampilan dan pengetahuan pemilik serta pekerja UMKM sangat penting untuk meningkatkan kinerja usaha. Melalui program pelatihan yang tepat, pemilik dan pekerja dapat mengatasi tantangan yang ada serta meningkatkan daya saing mereka di pasar. Oleh karena itu, dukungan dari

pemerintah dan lembaga terkait dalam bentuk pelatihan dan akses teknologi menjadi sangat diperlukan untuk memajukan sektor UMKM di Indonesia.

5). Kebijakan dan Dukungan Pemerintah

Dukungan dari pemerintah daerah dan nasional dalam bentuk kebijakan yang pro-UMKM, insentif, dan program bantuan sangat penting. Kebijakan yang mendukung, seperti pengurangan pajak untuk UMKM, kemudahan dalam perizinan usaha, dan akses ke pelatihan serta pendampingan, dapat membantu UMKM berkembang. Adapun Kebijakan Pusat dan Daerah terkait UMKM ialah sebagai berikut :

1. **Regulasi Pro-UMKM:** Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan UMKM, termasuk revisi undang-undang yang menghambat perkembangan iklim usaha. Ini mencakup pengaturan tentang bunga dan pajak yang lebih bersahabat bagi pelaku UMKM.
2. **Pengadaan Barang/Jasa:** Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 40% produk/jasa dari UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Ini bertujuan untuk meningkatkan akses pasar bagi UMKM.

Adapun Infrastruktur dan Akses Pembiayaan Pemerintah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

1. **Pembangunan Infrastruktur:** Pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk konektivitas digital, untuk membantu UMKM mengakses pasar lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional.
2. **Program Pembiayaan:** Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro, pemerintah berupaya memberikan akses pembiayaan bagi UMKM. Target penyaluran KUR pada tahun 2022 mencapai Rp373,17 triliun.

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan di daerah.

6). Kemitraan dan Jaringan

Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, perusahaan besar, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah, dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi UMKM. Jaringan yang kuat memungkinkan UMKM untuk berbagi sumber daya, mengakses informasi pasar, dan mendapatkan bantuan teknis. Berikut ini beberapa pentingnya Jaringan dan Kemitraan untuk UMKM ialah sebagai berikut :

a) Akses ke Peluang Baru

Membangun jaringan memungkinkan UMKM untuk mengakses peluang yang mungkin tidak dapat dijangkau sendiri. Melalui kolaborasi dengan pelaku bisnis lain, mereka dapat berbagi informasi mengenai proyek baru, pameran, dan pelatihan yang relevan.

b) Berbagi Pengalaman dan Pengetahuan

Jaringan bisnis memberikan kesempatan bagi UMKM untuk belajar dari pengalaman satu sama lain. Dengan berbagi kesuksesan dan kegagalan, pelaku UMKM dapat mengadopsi praktik terbaik dan menghindari kesalahan yang sama.

c) Dukungan dan Bantuan

Dalam jaringan, pelaku UMKM dapat saling memberikan dukungan saat menghadapi tantangan. Ini termasuk mendapatkan nasihat dari sesama pelaku bisnis serta akses ke sumber daya yang mungkin sulit diperoleh secara mandiri.

d) Membangun Hubungan Pelanggan yang Lebih Kuat

Kemitraan dengan bisnis lain dapat membantu UMKM menciptakan penawaran produk atau layanan yang lebih komprehensif, meningkatkan nilai bagi pelanggan dan memperluas pangsa pasar mereka.

e) Menghadapi Tantangan Bersama

Kolaborasi dalam jaringan memungkinkan UMKM untuk bersama-sama mengidentifikasi solusi terhadap tantangan pasar dan

teknologi yang terus berkembang. Ini memberikan kekuatan tambahan untuk bersaing di pasar.

Membangun jaringan dan kemitraan adalah langkah strategis bagi UMKM untuk tumbuh dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dengan memanfaatkan peluang baru, berbagi pengetahuan, mendapatkan dukungan, serta membangun hubungan pelanggan yang kuat, UMKM dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Kemitraan ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang bertujuan memberdayakan UMKM melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan.

7). Pemanfaatan Teknologi

Teknologi memainkan peran penting dalam mempercepat pengembangan UMKM. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran, penjualan, dan manajemen bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar UMKM. Namun, kurangnya akses dan pengetahuan tentang teknologi dapat menjadi hambatan bagi UMKM di daerah terpencil. Berikut adalah beberapa cara teknologi berperan dalam pengembangan UMKM yaitu sebagai berikut :

a) Pemasaran Digital

Teknologi memungkinkan UMKM untuk melakukan pemasaran digital yang lebih efisien melalui platform media sosial, website, dan marketplace. Hal ini membantu mereka menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan.

b) E-Commerce

Dengan adanya platform e-commerce, UMKM dapat menjual produk secara online tanpa batasan geografis. Ini membuka peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan omset penjualan.

c) Manajemen Inventaris

Sistem manajemen inventaris berbasis teknologi membantu UMKM mengelola stok dengan lebih baik, mencegah kelebihan atau kekurangan persediaan, serta meningkatkan proses produksi.

d) Layanan Pelanggan

Teknologi menyediakan alat untuk meningkatkan layanan pelanggan, seperti penggunaan chatbot dan sistem tiket online yang memungkinkan respons cepat terhadap pertanyaan pelanggan.

e) Analisis Data

Penggunaan teknologi memungkinkan UMKM untuk mengumpulkan dan menganalisis data, memberikan wawasan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategi pemasaran yang lebih efektif.

f) Efisiensi Operasional

Teknologi digital seperti cloud computing dan aplikasi mobile dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan memudahkan pengelolaan data dan transaksi.

Pemanfaatan teknologi merupakan langkah strategis bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Dengan memanfaatkan berbagai alat digital untuk pemasaran, manajemen, dan analisis data, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas jangkauan pasar mereka. Namun, untuk mencapai potensi penuh dari teknologi ini, diperlukan investasi dalam infrastruktur dan peningkatan literasi digital di kalangan pelaku UMKM.

8). Kondisi Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pengembangan UMKM. Sikap masyarakat terhadap kewirausahaan, peran gender dalam bisnis, serta nilai-nilai lokal dapat memengaruhi motivasi dan partisipasi masyarakat dalam usaha mikro dan kecil. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan UMKM dari perspektif sosial dan budaya sebagai berikut :

Faktor Sosial

- a) Tingkat Pendidikan dan Keterampilan ialah Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Tingkat

pendidikan dan keterampilan tenaga kerja lokal dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam usaha.

- b) Dukungan Komunitas ialah dukungan dari komunitas lokal, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, dapat memberikan akses kepada pelaku UMKM terhadap pelatihan, modal, dan jaringan bisnis yang lebih luas.
- c) Kestabilan Sosial ialah lingkungan sosial yang stabil, termasuk keamanan dan ketertiban, mendukung pertumbuhan UMKM dengan menciptakan suasana yang kondusif untuk berbisnis.

Faktor Budaya

- a) Nilai dan Norma Budaya ialah nilai-nilai budaya lokal dapat mempengaruhi cara pelaku UMKM menjalankan usahanya. Misalnya, budaya kewirausahaan yang kuat dapat mendorong lebih banyak individu untuk memulai usaha.
- b) Gaya Hidup dan Kebutuhan Masyarakat ialah perubahan dalam gaya hidup masyarakat serta kebutuhan konsumen dapat mendorong inovasi produk dan layanan yang ditawarkan oleh UMKM. Pelaku usaha perlu memahami tren ini untuk tetap relevan di pasar.
- c) Perilaku Kewirausahaan ialah sikap positif terhadap kewirausahaan dalam suatu budaya dapat meningkatkan motivasi individu untuk terlibat dalam bisnis, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan UMKM.

Pengembangan UMKM sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertimbangkan aspek-aspek ini dalam merancang kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan meningkatkan pendidikan, memberikan dukungan komunitas, serta memahami nilai-nilai budaya lokal, potensi UMKM dapat dimaksimalkan untuk kontribusi ekonomi yang lebih besar.

9). Kondisi Ekonomi

Keadaan ekonomi makro, seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan daya beli masyarakat, juga mempengaruhi pengembangan UMKM. Ekonomi

yang stabil dan kondisi pasar yang kondusif akan mendorong pertumbuhan UMKM, sementara ketidakstabilan ekonomi dapat menurunkan permintaan dan menghambat perkembangan usaha. Kondisi ekonomi yang mempengaruhi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Konawe dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan produksi, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat.

a) Faktor Produksi

- Ketidakstabilan Pasokan Bahan Baku: UMKM pengolahan tempe di Kabupaten Konawe Selatan menghadapi masalah ketidakstabilan pasokan bahan baku dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan fluktuasi dalam produksi dan harga jual tempe, yang berdampak pada pendapatan pelaku usaha.
- Keterbatasan Sumber Daya: Banyak UMKM di daerah ini beroperasi sebagai bisnis keluarga dengan keterbatasan dalam pengelolaan dan efisiensi produksi. Biaya tinggi untuk kegiatan produksi tidak sebanding dengan penerimaan yang diperoleh, sehingga menurunkan daya saing.

b) Faktor Pemasaran

- Marjin Tata Niaga: Penelitian menunjukkan bahwa marjin tata niaga untuk usaha tempe skala mikro bervariasi. Misalnya, jika produk dijual langsung ke konsumen akhir, keuntungan dapat mencapai 41.18%, sedangkan jika melalui pedagang pengumpul, marjinya hanya sekitar 20%¹. Hal ini menunjukkan pentingnya akses langsung ke pasar untuk meningkatkan pendapatan.
- Permintaan Masyarakat: Meskipun ada tantangan dalam produksi, permintaan akan tempe terus meningkat. Ini menciptakan peluang bagi UMKM untuk berkembang jika mereka dapat mengatasi masalah pasokan dan efisiensi.

c) Pemberdayaan Masyarakat

- Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): BUMDes di Kabupaten Konawe berupaya memberdayakan UMKM melalui program pelatihan dan penyediaan modal. Namun, terdapat kendala seperti rendahnya

antusiasme masyarakat dan keterbatasan kapasitas individu dalam mengelola usaha.

- **Modal Sosial:** Modal sosial perempuan pelaku UMKM menunjukkan adanya kepercayaan dan norma yang tinggi, meskipun jaringan sosial masih dalam kategori sedang. Ini menunjukkan potensi untuk meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha.

Kondisi ekonomi di Kabupaten Konawe mempengaruhi UMKM melalui tantangan dalam produksi dan pemasaran serta upaya pemberdayaan yang masih perlu ditingkatkan. Dengan mengatasi masalah pasokan bahan baku dan meningkatkan akses pasar, serta memperkuat program pemberdayaan masyarakat, UMKM di daerah ini memiliki potensi untuk tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal.

10). Lingkungan Regulasi

Regulasi yang jelas dan mendukung sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Regulasi yang terlalu rumit atau berbelit-belit dapat menjadi hambatan, sementara regulasi yang mendukung dapat membantu UMKM beroperasi dengan lebih mudah dan efisien. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor ini, UMKM di Kabupaten Konawe dapat lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan. Regulasi yang mendukung iklim usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Konawe mencakup berbagai kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk mempermudah proses perizinan dan pemberdayaan UMKM. Berikut adalah beberapa poin penting terkait regulasi tersebut:

a) Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan UMKM

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2020 mengatur tentang pemberdayaan koperasi dan UMKM. Regulasi ini menetapkan prinsip-prinsip pemberdayaan, pelaksanaan, dan koordinasi yang diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

b) Optimalisasi Pelayanan Perizinan

Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan UMKM. Meskipun sistem ini sudah ada, tingkat pemanfaatannya masih rendah, dengan banyak pelaku UMKM yang belum mengurus izin usaha mereka¹. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas izin usaha.

c) Pemberdayaan Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes di Desa Puudongi berperan dalam pemberdayaan UMKM dengan menyediakan pelatihan dan pembinaan. Namun, tantangan seperti kurangnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti program-program tersebut masih menjadi hambatan.

d) Dukungan Pemerintah

Pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan pendaftaran usaha dan relaksasi pajak. Ini termasuk menjadikan UMKM sebagai pusat investasi yang strategis dalam pengembangan ekonomi daerah.

e) Tantangan dan Upaya

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi ini termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aplikasi OSS-RBA dan sumber daya manusia yang belum optimal dalam pelaksanaan kebijakan¹². Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan pelatihan bagi ASN dan masyarakat untuk mengatasi kendala tersebut.

Regulasi dan kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah Kabupaten Konawe dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif. Regulasi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Konawe diatur dalam beberapa peraturan daerah yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan berbagai sektor.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Konawe memiliki peran krusial dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai pengembangan UMKM dan Peran UMKM dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Konawe :

1. Penciptaan Lapangan Kerja yaitu UMKM menyerap hingga 97% dari total angkatan kerja di Indonesia, sehingga berkontribusi signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran. Dengan banyaknya unit usaha yang tersebar di daerah pedesaan, UMKM menjadi sumber utama pekerjaan bagi masyarakat setempat.
2. Peningkatan Pendapatan ialah Pengembangan UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Melalui usaha lokal, penduduk desa memiliki kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup mereka, yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan.
3. Dukungan Ekonomi Lokal yaitu UMKM sering kali beroperasi dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Ini tidak hanya membantu mempertahankan kearifan lokal tetapi juga memperkuat ekonomi daerah.

Untuk Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut :

1. Akses Permodalan adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah akses terhadap permodalan. Pemerintah perlu menyediakan skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan insentif pajak untuk mendukung pertumbuhan usaha ini.
2. Pelatihan dan Pendidikan yaitu Pemberian pelatihan keterampilan dan manajemen usaha sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pengusaha mikro dan kecil. Ini termasuk pelatihan dalam penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha.

3. Peningkatan Akses Pasar ialah memfasilitasi akses pasar bagi produk-produk UMKM melalui pameran, platform online, atau kerjasama dengan retailer besar dapat membantu meningkatkan penjualan dan keberlanjutan usaha.

Pemerintah daerah diharapkan untuk terus mendorong pengembangan UMKM melalui kebijakan yang mendukung, seperti penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi, kebijakan yang mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha dan program-program yang mendorong inovasi dan keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Dengan langkah-langkah tersebut, pengembangan UMKM di Kabupaten Konawe dapat menjadi strategi efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Konawe melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Berikut adalah beberapa faktor kunci berdasarkan penelitian yang relevan:

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja

- a) Peningkatan Lapangan Kerja yaitu Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan melalui pengembangan UMKM. Dengan memperluas kesempatan kerja, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di masyarakat.
- b) Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat menciptakan permintaan tenaga kerja yang lebih tinggi. Di Kabupaten Konawe, pertumbuhan ekonomi yang baik dapat berkontribusi pada penurunan angka pengangguran.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- a) Pendidikan dan Keterampilan adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan di kalangan masyarakat menjadi penghambat dalam mengembangkan UMKM. Pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja sangat penting untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

- b) Pelatihan dan Pendampingan ialah Program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swasta dapat membantu meningkatkan keterampilan masyarakat, sehingga mereka lebih siap untuk terlibat dalam UMKM.

3. Kebijakan Pemerintah

- a) Dukungan Kebijakan ialah kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM, seperti subsidi bunga kredit dan bantuan modal usaha, sangat penting untuk mendorong pertumbuhan sektor ini⁴
- b) Partisipasi Masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam program-program pemerintah juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan efektif dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

4. Infrastruktur dan Akses Pasar

- a) Infrastruktur yang memadai seperti pengembangan infrastruktur seperti jalan, transportasi, dan akses ke pasar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM. Tanpa infrastruktur yang baik, distribusi produk akan terhambat, sehingga mempengaruhi pendapatan pelaku usaha.
- b) Akses ke pasar adalah meningkatkan akses pelaku UMKM ke pasar lokal maupun nasional dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan mereka, berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

5. Faktor Sosial

- a) Budaya Kewirausahaan yaitu masyarakat perlu didorong untuk memiliki semangat kewirausahaan. Program-program yang mempromosikan kewirausahaan dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.
- b) Keterbatasan Informasi adalah kurangnya informasi mengenai peluang usaha dan dukungan yang tersedia juga menjadi kendala bagi pengembangan UMKM. Oleh karena itu, peningkatan akses informasi sangat penting.

Secara keseluruhan, pengembangan UMKM di Kabupaten Konawe memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku

kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

B. Rekomendasi

Penyusunan Dokumen Analisis Pengembangan Usaha Mikro (Kecil dan Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengetasan Kemiskinan dan Pengangguran yang memiliki potensi untuk direkomendasikan menjadi prioritas pengembangan UMKM di Kabupaten Konawe tahun 2024 merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan dari Visi Misi Pemerintah Kabupaten Konawe. Sebagai Sentra Pengembangan Komoditi Pertanian, Perindustrian dan Koperasi serta Hortikultura, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Pariwisata dan Pertambangan. Penelitian ini telah melakukan pemetaan terhadap beberapa tempat potensial untuk dikembangkan UMKM di Kabupaten Konawe. Terbentuknya UMKM merupakan bagian dari upaya mewujudkan sektor prioritas dibidang Perindustrian dan Koperasi dengan memberikan peran kepada masyarakat local untuk mengembangkan UMKM.

Pengembangan UMKM di Kabupaten Konawe menunjukkan potensi besar dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran, namun menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM serta memperluas akses pasar dan pembiayaan. Dengan langkah-langkah strategis, UMKM dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Konawe.

Secara umum penelitian ini memberikan suatu solusi terbaik untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Konawe serta adanya kolaborasi antara pihak- pihak yang terkait. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Konawe guna mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah.

REFERENSI

- Agung, A. P. (2012). Metodologi Penelitian Bisnis. Malang: Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia.
- Al Falih, M. S., Rizqi, R. M., & Ananda, N. A. (2019). Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Usaha pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi kasus pada UMKM madu hutan Lestari Sumbawa). *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- Aceh, P. K. (2021). sekilas sejarah Banda Aceh. Retrieved from <http://bandacehkota.go.id.>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021.
- Ahmad. 2008. Teknik Penulisan Kualitatif dalam Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan. Malang: Kalimasada Press. 1996. UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah
- Akdon. 2008. Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian Untuk Administrasi Manajemen. Bandung: Dewa Ruci. Faisal,
- Bank Indonesia (2021). Framework Pengembangan UMKM Jakarta: Bank Indonesia
- Bungin, M. (2011). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pranada Media Group.
- Furchan, Arif. 1992. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional.
- Luthfa. (2021, November 10). Masalah Umkm Dan Solusinya. Diambil kembali dari OYI: <https://www.oyindonesia.com/blog/masalah-umkm-dan-solusinya>
- Latumaerissa, J. R. (2015). Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lawaldy, R., & Nasution, J. (2022). Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemperer*, 5, 66-74.
- Miller. J.C. dan J.N. Miller. 1991. Statistika Untuk Kimia Analistik. Bandung: ITB.
- Moeloeng. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musa. 2009. Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis. Bogor: Ghalia Indonesia. [Id.wikipedia.org/wiki/pertumbuhan_ekonomi](https://id.wikipedia.org/wiki/pertumbuhan_ekonomi)
- Ropke, Jochen. 1992. Cooperative Entreprenship. Marburg –German.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah cano ekonomos*.
- Sujarweni. (2021). Metodologi penelitian-bisnis dan ekonom. Yogyakarta: Pustakabapurpress.
- Suyadi, Syahdanur, & Suryani, S. (2018). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau. *Jurnal*

Ekonomi KIAT, 1-10.

- Sanapioh. 1982. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. Riset Ekonomi Pembangunan, 137-146.
- Sudaryanto, Ragimun, & Wijayanti, R. R. (2013). Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, 1-32.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2005. Manajemen Penelitian. Bumi Aksara . Jakarta Sunhaj, Supriyanto. (2006). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Ekonomi & Pendidikan, Hal.1-16.
- Tambunan, T. T. (2021). UMKM di Indonesia , Perkembangan, Kendala, dan Tantangan. Jakarta: Prenada
- Utami, S. N. (2021, April 19). UMKM: Pengertian, Tujuan, Karakteristik, Jenis, Dan Contohnya. Diambil kembali dari Kompas: